

e-news letter

JAN II 2020

PKS PARLEMEN

KREATIF SUBSTANTIF

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



H. ECKY AWAL MUCHARAM

Segera Bentuk Pansus Jiwasraya





Jiwasraya, Natuna, dan Bencana. Tiga kata serangkai menyita perhatian publik di awal tahun.

Terkadang membuat kita mengernyitkan dahi, kenapa bangsa ini seakan tidak pernah bisa belajar dari kesalahan masa lalu hingga akhirnya mampu lebih mawas diri dimasa depan agar tidak terjadi lagi. Apa ini salah urus, tidak diurus atau terlalu banyak yang urus. Entahlah, kabut gelap seringkali timbul saat sebuah kasus terjadi. Hingga akhirnya kita semua saling menyalahkan dan saling mengunci satu sama lain.

Lalu apa beda Jiwasraya, dengan century dan BLBI ? tidak sama, tapi faktanya menjadi bukti salah urus sektor keuangan untuk kesekian kali. Fraksi PKS serius mendorong pengungkapan kasus Jiwasraya, salah satu ikhtiarnya mendesak DPR membuat Pansus.

Mencermati kasus Natuna sesungguhnya tentang kemampuan kita menjaga beranda depan batas teritorial negara. Tiba-tiba memori kita terlempar kembali saat pidato kemenangan Presiden Jokowi di periode pertama yang menyatakan salah satu kelemahan besar bangsa ini adalah karena kita terlalu lama memunggungi samudra, laut,

selat dan teluk, sehingga sumber kekayaan bangsa yang sangat besar di laut ini hanya dinikmati oleh bangsa lain dengan cara mencuri. lima tahun berlalu, lalu mengapa text pidato itu seakan kehilangan makna? faktanya punggung tak pernah jadi dada yang membusung dihadapan kapal-kapal pencuri ikan. Meski oposisi, sikap Fraksi PKS jelas dan tegas dalam kesadaran penuh sebagai entitas yang cinta NKRI mendukung pemerintah menegakan kedaulatan negara di Natuna.

Terakhir, Bencana bisa datang kapan dan dimana saja. Tidak bisa ditolak, hanya diminimalisir dampaknya. Namun demikian saat ini sudah semakin maju ilmu tentang kebencanaan. Kita pun sudah punya road map bencana dari berbagai lembaga, sebut saja Renstra dan Roadmap Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019. Pun lembaga yang bergerak di bidang bencana baik

pemerintah maupun nirlaba. Ironisnya bencana oleh segelintir orang, baik ditingkat elit dan akar rumput sebagai bekal "nyinyir". Kemudian di amplifikasi via medsos, digosok-gosok dengan narasi jahat. Inilah bentuk bencana yang jauh lebih berbahaya dan memiliki daya rusak luar biasa. Fraksi PKS tidak mau berpangku tangan dan berwacana, memilih terjun langsung ke titik dan simpul bencana dari mulai pimpinan Fraksi, Partai hingga ranting terkecil. Ini tentang kita, bukan hanya mereka.

Allhamdulillah reses telah usai, semua Anggota telah menyerap, mendengar dan siap memperjuangkan aspirasi rakyat. Bismillah.

Semoga seluruh langkah Fraksi PKS menjadi pelipatganda dan muawal sebab hadirnya kesejahteraan dan kemashlahatan bagi rakyat. Mohon doanya.

Humas Fraksi PKS DPR RI

Apa beda Jiwasraya, dengan century dan BLBI? tidak sama, tapi faktanya menjadi bukti salah urus sektor keuangan untuk kesekian kali. Fraksi PKS serius mendorong pengungkapan kasus Jiwasraya, salah satu ikhtiarnya mendesak DPR membuat Pansus.



JIWASRAYA GATE

JAZULI JUWAINI
Ketua Fraksi PKS DPR

(Pansus) ini penting biar terang benderang siapa yang telah mengambil dan menerima cipratan uang milik masyarakat yang telah susah payah ikut bergabung di asuransi Jiwasraya ini

ANIS BYARWATI
Anggota Komisi XI DPR

Kami tidak akan memberi celah kepada aktor intelektual untuk memanfaatkan atau berlindung di balik kekuatan Pansus

ECKY AWAL
Anggota Komisi XI DPR

Saya sangat menyayangkan persoalan Jiwasraya tidak pernah dibuka ke publik, dan setelah memburuk dan gagal bayar baru terungkap

NEVI ZUAIRINA
Anggota Komisi VI DPR

Sebagai pengawas kinerja pemerintah, kami FPKS akan meminta Kementerian BUMN dan Aparat penegak hukum agar menindaklanjuti adanya indikasi kecurangan (fraud) di tubuh Jiwasraya

BENTUK PANSUS SEGERA

SOHIBUL IMAN
Presiden PKS

Karena kita berkeinginan agar ini bisa terang benderang di hadapan publik. Maka PKS mendorong agar adanya pansus

HIDAYAT NUR WAHID
Wakil Ketua MPR RI

Kasus Jiwasraya perlu pendekatan yang serius. Dua pendekatan sekaligus, pendekatan hukum iya, pendekatan politik melalui pansus DPR iya.

AMIN AK
Anggota Komisi VI DPR

Ini bagian dari operasi bersih-bersih BUMN. Dari hasil audit investigasi ini kita bisa mengetahui kerugian yang benar-benar disebabkan oleh tindakan manajemen yang salah dan kerugian yang disebabkan oleh tindakan curang (fraud),

ini penting agar terang benderang siapa yang telah mengambil dan menerima cipratan uang milik masyarakat yang telah susah payah ikut bergabung di asuransi Jiwasraya

ROFIK HANANTO
Anggota Komisi VII DPR

Kasus Jiwasraya adalah warning keras untuk kita bersama

JUNAIDI AULY
Anggota Komisi XI DPR

Masalah jiwasraya krusial untuk dilakukan audit investigasi, bahkan urgensi untuk dilakukan pembentukan Pansus di DPR

PKS Terus Desak Pembentukan Pansus Jiwasraya

Kalau kita lihat ada persoalan struktural di perusahaan asuransi tersebut dan mungkin sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu, masalahnya sangat rumit seperti produk saving plan, kualitas aset, penempatan investasi yang tidak kredibel hingga masalah perilaku pemburu rente. Saya sangat menyayangkan persoalan Jiwasraya tidak pernah dibuka ke publik, dan setelah memburuk dan gagal bayar baru terungkap

H. ECKY AWAL MUCHARAM

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan

Jakarta (03/01) — Merebaknya kasus gagal bayar asuransi Jiwasraya menjadi catatan buruk tata kelola industri keuangan di Indonesia.

Dengan status perusahaan asuransi BUMN sorotan publik terhadap Jiwasraya semakin intens dan terus meminta kehadiran pemerintah untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Sebagai sektor yang berbasis lewat kepercayaan, kasus Jiwasraya berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat.

Dampaknya bisa sangat kompleks dan memengaruhi industri keuangan, hingga

perekonomian nasional secara menyeluruh.

Anggota DPR RI Komisi XI Ecky Awal Mucharam menyalkan apa yang terjadi pada Jiwasraya.

"Kalau kita lihat ada persoalan struktural di perusahaan asuransi tersebut dan mungkin sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu," papar Ecky di Jakarta (3/1).

Ecky menjelaskan masalahnya sangat rumit seperti produk _saving plan_, kualitas aset, penempatan investasi yang tidak kredibel hingga masalah perilaku

pemburu rente.

"Saya sangat menyayangkan persoalan Jiwasraya tidak pernah dibuka ke publik, dan setelah memburuk dan gagal bayar baru terungkap", papar Ecky.

Wakil ketua Fraksi PKS ini menyatakan pihaknya melihat kasus Jiwasraya lebih disebabkan oleh _fraud_.

"Untuk itu harus segera dilakukan audit investigasi terhadap aset dan aliran investasinya. Jika dipahami lebih lanjut, kejahatan di Jiwasraya bisa digolongkan sebagai bentuk _Organized Crime_," kata Ecky.

Hal ini lanjut Ecky, bermakna bahwa kejahatan dilakukan oleh internal secara masif dan terorganisir dalam jangka waktu cukup lama. Dalam kasus ini, nasabah terus menjadi pihak yang dirugikan.

"PKS melihat perlu upaya maksimal membongkar permasalahan yang melingkupi Jiwasraya, termasuk pembentukan Pansus Jiwasraya," papar Ecky.

"Pansus bisa meminta dilakukannya audit investigasi terhadap semua aset, investor dan aliran dana investasi. Kami ingin kasus ini jelas dan tuntas," tutup Ecky.



PKS akan Kawal Penanganan Kasus Jiwasraya di Kejagung

Kami tidak akan memberi celah kepada aktor intelektual untuk memanfaatkan atau berlindung di balik kekuatan Pansus,

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS

Jakarta (08/01) -- DPR berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menginvestigasi skandal perusahaan asuransi Jiwasraya. Bila terbentuk, Anggota Komisi XI dari Fraksi PKS Anis Byarwati berharap agar Pansus tidak ditunggangi oleh para pelaku skandal Jiwasraya.

"Kami tidak akan memberi celah kepada aktor intelektual untuk memanfaatkan atau berlindung di balik kekuatan Pansus," ujar Anis kepada wartawan, Selasa, (7/1/2020).

Selain angka konsen pada penyelesaian politik di DPR, PKS menurut Anies akan mengawal proses hukum Jiwasraya Di Kejaksaan Agung (Kejagung).

Tujuannya agar, penyelidikan kasus Jiwasraya dapat berjalan independen dan dapat membongkar aktor intelektual kasus dugaan korupsi defisit keuangan

perusahaan plat merah tersebut.

"PKS konsisten mengawal aspek pidana yang ditangani Kejagung agar berjalan independen," katanya.

Sebelumnya Kejaksaan Agung RI kembali melanjutkan pemeriksaan mengenai kasus gagal bayar yang membelit PT asuransi Jiwasraya (Persero). Pada Selasa (7/1/2020), mereka memanggil sebanyak 5 orang lagi sebagai saksi.

Namun, Kapuspenkum Kejagung RI, Hari Setiyono menyatakan, satu orang saksi mangkir dari panggilan penyidik.

Dia adalah Direktur PT Pool Advista Aset Manajemen.

Sedangkan 4 saksi lainnya memenuhi panggilan penyidik. Di antaranya, Kadiv Bidang Agen PT Jiwasraya, Handi Surya Adiguna dan Kepala divisi sekretariat perusahaan PT Jiwasraya 2015-2018,

Sumarsono.

Selain itu, Kepala Divisi Hukum PT Jiwasraya 2015-2018, Ronang Andrianto dan Kadiv Pemasaran PT Jiwasraya, Ida Bagus Adinugraha.

"Pada hari ini penyidik memanggil lima orang saksi. Tetapi yang hadir 4 orang saksi. Jadi total sudah sebanyak 16 saksi," kata Hari.

Adapun Direktur PT Pool Advista Aset Manajemen tidak memberikan keterangan lebih lanjut secara lisan maupun tulisan kepada Kejaksaan Agung RI atas ketidakhadirannya hari ini.

"Sampai hari ini belum ada informasi nantinya akan dipanggil lagi," ungkapnya.

Ditungkapkan Hari, pemeriksaan seluruh saksi bertujuan menggali alat bukti terkait kasus yang tengah membeli Jiwasraya.

"Harapan penyidik kita mendapatkan alat bukti dari keterangan saksi tersebut. Yang nantinya dapat memberikan gambaran atau keterangan tentang penanganan perkara ini. Jadi perkembangan lebih lanjut tentu dikaitkan dengan alat bukti yang lainnya," tukasnya.



Junaidi Auly: Pansus Jiwasraya Penting Segera di Bentuk

Pada 2017 misalnya, perusahaan (manajemen lama) melaporkan laba bersih sekitar Rp2,4 triliun (unaudited). Sementara itu, menurut audit PwC dimana laba hanya Rp. 360 miliar. Berbagai masalah tersebut tentunya krusialnya untuk dilakukan audit investigasi, bahkan urgensi untuk dilakukan pembentukan Pansus di DPR

Ir.H.A. JUNAIDI AULY, M.M.

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (06/01) — Masalah Jiwasraya menambah jajaran Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) milik pemerintah dengan tatakelola buruk.

Persoalan yang dihadapi perusahaan tersebut bermula dari kegagalan program JS Proteksi Plan. JS Proteksi Plan merupakan produk *bancassurance* yang memberikan manfaat asuransi jiwa berupa santunan meninggal dunia, bukan dan atau karena kecelakaan atau cacat tetap total karena kecelakaan. Premi

(sekaligus) minimal Rp. 50 juta dan maksimal Rp. 5 miliar.

Anggota DPR RI FPKS Junaidi Auly menjelaskan bahwa sebagian besar dana yang dikumpulkan dari program JS Proteksi Plan diinvestasi ke pasar saham (repo saham) dan reksadana.

“Kita tahu bahwa Repo saham (repurchase agreement) merupakan pinjaman yang diberikan dengan agunan berupa saham. Suku bunga cukup tinggi, karena risikonya juga tinggi. Kondisi pasar yang fluktuatif

menyebabkan return saham cenderung menurun dan menyebabkan kondisi keuangan Jiwasraya tertekan,” ungkap Junaidi.

Total nilai klaim program investasi Saving Plan dari tujuh mitra bancassurance mencapai Rp16,42 triliun. Secara total, konsumen Jiwasraya kurang lebih 6 juta. Pada 2009, aset Jiwasraya mencapai Rp 5,4 triliun; terus meningkat, hingga mencapai Rp45,6 triliun pada 2017. Laba perusahaan juga meningkat dari Rp356 miliar pada 2009 menjadi Rp360 miliar pada 2017. Tahun 2018 dan 2019 (September) perusahaan rugi masing-masing Rp 15,8 triliun dan Rp13,7 triliun.

Legislator asal Lampung ini melanjutkan, Kalau dilihat asetnya, penempatan pada reksadana hampir 50%; ke saham sekitar 17% tanah dan bangunan 17% deposito berjangka dan obligasi korporasi masing-masing 11% dan 4,5%. Liquid asset perusahaan sangat sedikit.

Selain masalah kegagalan program JS Proteksi Plan,



Junaidi menjelaskan terdapat persoalan lainnya lewat manipulasi laporan keuangan.

“Pada 2017 misalnya, perusahaan (manajemen lama) melaporkan laba bersih sekitar Rp2,4 triliun (unaudited). Sementara itu, menurut audit

PwC dimana laba hanya Rp. 360 miliar. Berbagai masalah tersebut tentunya krusialnya untuk dilakukan audit investigasi, bahkan urgensi untuk dilakukan pembentukan Pansus di DPR,” tutup Junaidi.

PKS Siap Galang Kekuatan Fraksi Bentuk Pansus Jiwasyraya



Karena kita berkeinginan agar ini bisa terang benderang di hadapan publik. Maka PKS mendorong agar adanya pansus

H. MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D

Presiden PKS

Jakarta, CNN Indonesia – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibil Iman menyatakan pihaknya telah menyetujui agar DPR segera membentuk panitia khusus (Pansus) guna mengungkap kasus yang terjadi di BUMN PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Sohibil menyatakan upaya pembentukan Pansus bertujuan untuk mengungkap kasus PT Jiwasraya agar terang benderang di masyarakat.

"Ya karena kita berkeinginan agar ini bisa terang benderang di hadapan publik. Maka PKS mendorong agar adanya pansus," kata Sohibil di Kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (6/1).

Sohibil sendiri menyatakan Fraksi PKS di DPR tak ingin sendirian dalam menginisiasi pembentukan Pansus tersebut. Ia pun berjanji akan mengajak parpol lainnya agar sependapat

membentuk pansus.

Terlebih lagi, Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dito Ganinduto mengatakan komisinya tidak akan terburu-buru mengusulkan Pansus. Sohibil menyatakan kolaborasi antar fraksi di DPR harus dicanangkan agar Pansus itu bisa terbentuk.

"Nanti kita ajaklah partai-partai lain," kata dia.

Pernyataan Sohibil itu senada dengan Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid beberapa waktu lalu. Hidayat menyatakan PKS setuju dengan pembentukan Pansus Jiwasraya.

Menurutnya kasus Jiwasraya harus dibongkar tuntas untuk menemukan aktor utama sebagai pelaku yang merugikan perusahaan asuransi plat merah tersebut.

"Itu sangat memprihatinkan dan harus dibongkar tuntas.

Kalau hanya melalui pendekatan hukum, sisi-sisi yang lebih dalamnya tidak bisa diangkat. Karena mungkin kan hanya formalitas siapa salah. Tapi mengapa bersalah tidak akan diungkap di sana," kata Hidayat di Kompleks MPR/DPR, beberapa waktu lalu.

Sejumlah partai sudah lebih dulu menyampaikan secara lisan soal persetujuan terhadap wacana pembentukan pansus atau panitia kerja (panja) Jiwasraya. Yakni, PKB, Partai Demokrat, PDIP, Partai Golkar, dan PPP.

Sebelumnya, Kejagung melakukan pencegahan dan penangkalan terhadap 10 orang terkait pengusutan kasus dugaan korupsi di balik defisit anggaran PT Asuransi Jiwasraya.

Sepuluh orang yang dicekai yakni HR, DA, HP, NZ, DW, GL, ER, HD, BT, dan AS. Dalam kasus itu, Kejagung sejauh ini menduga kerugian negara mencapai Rp13,7 triliun (r2r/ain)

Foto : M. Hilal

PEMERINTAH HARUS TEGAS SOAL NATUNA

Penangkapan ikan oleh kapal-kapal nelayan Cina dan perobosan yang dilakukan Coast Guard Cina merupakan tindakan ilegal, melanggar hukum internasional, Keputusan SCS Tribunal 2016 yang telah mematahkan klaim unilateral Cina. Jika protes keras RI tidak digubris Cina, Pemerintah RI harus memastikan semua konsekuensi serius, tegas, dan terukur yang akan diterima Cina

Indonesia memiliki hak berdaulat atas Wilayah Natuna berdasarkan Hukum Laut Internasional (UNCLOS) yang diakui dunia. Untuk itu negara manapun harus menghormati kedaulatan NKRI termasuk Cina.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI

Abd. Kharis Almasyhari

Langkah pemerintah Indonesia layangkan nota protes ke Cina belumlah cukup. Kalau terbukti, beri tindakan tegas, terukur, dan jelas. Kita tidak pernah main-main soal kedaulatan NKRI,"

Anggota Komisi IV DPR RI

Slamet

Kata kunci dari persoalan di Natuna yakni eksistensi. Pemerintah atau nelayan Indonesia harus selalu hadir di Laut Natuna Utara untuk menunjukkan bahwa Indonesia berdaulat atas wilayah tersebut



Ketua Fraksi PKS DPR RI
Anggota Komisi I DPR

Jazuli Juwaini

Jika protes keras RI tidak digubris Cina, Pemerintah RI harus memastikan semua konsekuensi serius, tegas, dan terukur yang akan diterima Cina



Anggota Tim
Perbatasan DPR RI

Alifuddin

Harus kita pertahankan habis-habisan wilayah kedaulatan NKRI kita yang telah menjadi kesepakatan

internasional, jadi tidak boleh negara lain mengganggu



Anggota Komisi I DPR
Wakabid Polhukam
Fraksi PKS

Sukamta

Pemerintah Indonesia harus amankan wilayah NKRI khususnya di perairan Natuna, melalui semua jalur yaitu diplomasi, keamanan, pertahanan, dan pengelolaan ekonomi



Wakil Ketua BKSAP
DPR RI

Mardani

Jika dibiarkan, ini bisa menjadi konflik yang serius. Segala cara harus digunakan untuk mempertahankannya



Anggota DPR RI
Dapil Luar Negeri

Hidayat Nur Wahid

Pernyataan Presiden Jokowi sangat jelas bahwa Natuna adalah bagian dari teritorial Indonesia. Karenanya keutuhan NKRI adalah harga mati. karenanya Jangan dikalahkan untuk kepentingan investasi

Facebook: Fraksi PKS DPR RI

Twitter: fraksiksdpri

Instagram: @fpksdpri

Website: fraksi.pks.id

Mardani: Pemerintah Tindak Tegas Pengganggu Kedaulatan Teritori Negara

“Lautan Natuna merupakan bagian dari NKRI, dan tidak akan pernah bisa di aneksasi Tiongkok, Pemerintah Indonesia tidak perlu takut gangguan macam ini,

Dr. H. MARDANI, M.Eng

Wakil Ketua BKSAP DPR RI

Jakarta (07/01) — Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, meminta Pemerintah menindak tegas pengganggu (Kapal Tiongkok) kedaulatan teritori wilayah negara.

Mardani menganggap konflik Indonesia-Tiongkok di wilayah Natuna merupakan hal yang serius.

“Pertama-tama saya mengapresiasi pejabat pemerintah melalui Menlu yang sudah menyatakan nota protes kepada Pemerintah Tiongkok karena insiden kapal nelayan yang dikawal cost guardnya di Natuna,” kata Mardani, Minggu (5/1).

Ketua DPP PKS ini mengatakan bahwa lautan natuna adalah wilayah kedaulatan Indonesia sesuai ketentuan United Convention for The Law of Sea (UNCLOS) PBB.

“Lautan Natuna merupakan bagian dari NKRI, dan tidak

akan pernah bisa di aneksasi Tiongkok, Pemerintah Indonesia tidak perlu takut gangguan macam ini,” ujar Mardani.

Selanjutnya, ia juga minta Pemerintah tidak hanya menggunakan cara-cara diplomasi bila Tiongkok tetap bersikeras menolak layangan protes dari Indonesia. Segala cara harus digunakan untuk mempertahankan kedaulatan wilayah nasional, bisa gunakan cara total football bila jalur diplomasi tidak mempan juga,” ujar Inisiator gerakan #KamiOposisi ini.

Lebih lanjut, Mardani minta pemerintah Indonesia memperkuat keamanan di berbagai wilayah laut yang berpotensi konflik termasuk di wilayah natuna agar tidak terjadi gangguan ancaman seperti ini dari negara lain.

“Tujuannya untuk memperkuat keamanan militer,

pemerintah bisa pertama bisa menggunakan Deterrence; selanjutnya menggunakan Defence; kemudian Compellence; Terakhir bisa menggunakan aliansi dan balance of power,” pungkas Anggota DPR asal Dapil Jakarta Timur ini.

Seperti diketahui klaim Tiongkok atas perairan itu juga tumpang tindih dengan sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei. Bahkan, kepulauan yang oleh Tiongkok disebut Nansha itu juga memiliki nama lain, yakni Kepulauan Spratly.

Sidang sengketa yang digelar di Den Haag, Belanda, pada Juli 2016 telah memutuskan Tiongkok tidak memiliki landasan hukum atas klaim tersebut. Laut Cina Selatan adalah bagian dari Samudera Pasifik yang membentang dari Selat Karimata dan Selat Malaka, hingga Selat Taiwan.

Dengan luas mencapai 3,5 juta kilometer persegi, perairan ini menjadi jalur utama bagi sepertiga pelayaran dunia. Selain itu, perairan ini juga punya potensi perikanan, serta cadangan minyak dan gas bumi yang besar.



Sikapi Konflik Natuna

Anggota DPR: Jelas bahwa Natuna Itu Batas Indonesia

Jelas bahwa Natuna itu batas kita dan itu harga mati, harus kita lawan, jangan kita diam, "Menurut saya, kita siap mendukung, apalagi kita tim pengawas, walaupun belum rapat resmi, tapi sebagai pribadi anggota dewan punya hak berbicara. Maka harus kita pertahankan habis-habisan wilayah kedaulatan NKRI kita yang telah menjadi kesepakatan internasional, jadi tidak boleh negara lain mengganggu," jelas Politikus PKS ini.

H. ALIFUDDIN, SE,MM

Anggota Tim Perbatasan DPR RI

Pontianak (05/01) — Satu diantara Anggota Tim Perbatasan DPR RI, Alifuddin mendukung penuh agar pemerintah melakukan tindakan tegas terhadap hal-hal yang mengganggu kedaulatan Indonesia.

Hal tersebut seperti klaim China terhadap Laut Natuna Indonesia yang kini menjadi pembicaraan hangat di masyarakat.

"Jelas bahwa Natuna itu batas kita dan itu harga mati,

pertahankan habis-habisan wilayah kedaulatan NKRI kita yang telah menjadi kesepakatan internasional, jadi tidak boleh negara lain mengganggu," jelas Politikus PKS ini.

Termasuk, menurut legislator asal Kalbar ini, dengan patok-patok ataupun batas daerah dengan negara yang berbatasan jalur darat.

"Pokoknya kita, intinya kembali kalau jika terjadi perbedaan patok harus dikembalikan kepada patok semula," tegasnya.

"Maka nanti kami rapat dengan tim maka akan jelas duduk permasalahannya, dan itu ada titik koordinatnya, kita bicara titik koordinat," pungkasnya.

harus kita lawan, jangan kita diam," kata Alifuddin, Minggu (05/01/2020) di Pontianak.

Anggota komisi 9 DPR RI ini pun mendukung penuh sikap dari TNI yang telah melakukan persiapan tempur di laut Natuna.

"Menurut saya, kita siap mendukung, apalagi kita tim pengawas, walaupun belum rapat resmi, tapi sebagai pribadi anggota dewan punya hak berbicara."

"Maka harus kita



Sukamta: Amankan Kedaulatan Natuna Melalui Semua Jalur

Sudah saatnya Indonesia bersikap lebih tegas kepada Tiongkok sebagaimana pemerintah bersikap tegas kepada Uni Eropa soal sawit. Harga NKRI lebih mahal daripada sawit karena itu kepentingan menjaga NKRI perlu menjadi prioritas. Kita tidak perlu drama dalam kasus ini tetapi juga jangan menggampangkan persoalan

H. SUKAMTA, Ph.D.

Anggota Komisi I DPR RI

Jakarta (05/01) — Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta menilai Pemerintah Indonesia harus mengamankan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) khususnya di perairan Natuna, Kepulauan Riau, melalui semua jalur yaitu diplomasi, keamanan, pertahanan, dan pengelolaan ekonomi.

"Kami minta Pemerintah Indonesia bersikap tegas dalam urusan kedaulatan negara. Ini terjemahan nyata dari sikap kita NKRI harga mati," kata Sukamta di Jakarta, Sabtu (4/1).

Dia menjelaskan, untuk jalur diplomasi merupakan tugas Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memaksimalkan upaya menjaga NKRI, salah satunya melalui ASEAN.

Menurut dia, sudah saatnya Indonesia melakukan konsolidasi ASEAN yang mungkin selama ini agak terabaikan.

"Diplomasi tugas Kemenlu untuk memaksimalkan upaya menjaga NKRI, salah satunya melalui ASEAN. Banyak negara anggota ASEAN yang terkena klaim Tiongkok ini," ujarnya, dikutip Antara.

Sukamta menegaskan bahwa Indonesia tidak mengakui "nine dash line" atau sembilan garis putus-putus Tiongkok yang menjadi klaim mereka atas Laut Tiongkok Selatan dan yang meliputi wilayah beberapa negara termasuk wilayah NKRI.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu menilai sudah saatnya Indonesia bersikap lebih tegas kepada Tiongkok sebagaimana pemerintah bersikap tegas kepada Uni Eropa soal sawit. "Harga NKRI lebih mahal daripada sawit karena itu kepentingan menjaga NKRI perlu menjadi prioritas. Kita tidak perlu drama dalam kasus ini tetapi juga jangan menggampangkan persoalan," katanya.

Foto : Gilang



Ingatkan Janji Jokowi Soal Natuna

HNW: Kedaulatan dan Keutuhan NKRI Harga Mati

“Pernyataan Presiden Jokowi sangat jelas dan tegas bahwa Natuna (termasuk Natuna Utara) adalah bagian dari teritorial Indonesia. Karenanya bagian dari NKRI, yang (keutuhan) NKRI adalah harga mati”

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI II

Jakarta (05/01) --- Anggota DPR RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan Presiden Joko Widodo dan jajaran Menteriannya, bahwa klaim sepihak Tiongkok terhadap Natuna, Kepulauan Riau adalah persoalan kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tidak bisa disepelekan dan tidak bisa ditawarkan dengan dalih investasi atau lainnya.

Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua MPR RI, menanggapi insiden ngototnya pihak jebir Kemenlu China yang mengklaim kawasan laut china selatan (Natuna Utara) sebagai teritorialnya, dan menolak keputusan ANCLOS dan Arbitrase PBB yg mengauki

kawasan (laut) Natuna Utara sbg bagian dari NKRI.

Dengan sikapnya itu maka masuklah sejumlah kapal Tiongkok dengan pengawalan Angkatan Laut Tiongkok di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau.

Sebagaimana diketahui, insiden tersebut memicu operasi siaga tempur oleh TNI di perairan Natuna serta membuat Kemenlu RI melayangkan nota protes ke pemerintah Tiongkok. Namun tidak digubris oleh pihak Tiongkok.

Hidayat mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk membuktikan dan melaksanakan pernyataannya mengenai Natuna saat kampanye pilpres 2019.

“Pernyataan Presiden Jokowi sangat jelas dan tegas bahwa Natuna (termasuk Natuna Utara) adalah bagian dari teritorial Indonesia. Karenanya bagian dari NKRI, yang (keutuhan) NKRI adalah harga mati”, tegas pria yang akrab disapa HNW.

HNW mengingatkan Jokowi pernah mengatakan tidak takut terhadap mereka yang mengklaim Natuna Utara. Itu untuk mempertahankan keutuhan NKRI.

“Pernyataan terbuka itu, sekarang lah saat membuktikannya, ketika ada kengototan pihak China untuk melanggar kedaulatan teritorial Indonesia di Natuna Utara”, sebutnya di Jakarta, (4/1).

Anggota DPR-RI FPKS dari Dapil DKI Jakarta II meliputi Luar Negeri ini juga mengkritik keras pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta ketegangan dengan Tiongkok karena insiden di Natuna tak perlu dibesar-besarkan karena berkaitan dengan investasi Tiongkok di Indonesia, terutama terkait

dengan perpindahan Ibukota, karena China akan menjadi investor terbesar untuk membangun Ibukota yang baru.

Hidayat menilai pernyataan tersebut tidak wajar dan tidak sepatutnya, karena keutuhan NKRI tidak boleh dikalahkan dengan alasan investasi.

“Apalagi soal pembangunan Ibukota yang baru, belum ada payung hukumnya. Padahal soal Natuna, adalah soal keutuhan dan kedaulatan NKRI. Dan banyak orang selalu menierakkkan NKRI harga mati,” tegas Hidayat lagi.

Hidayat mengingatkan bahwa DPR dan Pemerintah pada akhir periode 2019 – 2024 telah sepakat mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Bila merujuk Pasal 4 UU ini, maka tindakan Tiongkok sudah masuk ke dalam kategori ancaman terhadap NKRI.

“Pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa pelanggaran wilayah perbatasan masuk kepada kategori ancaman terhadap NKRI. Pemerintah mestinya juga harus segera menjalan kan UU ini, di

antaranya dengan menyusun program bela negara, pembentukan Komponen Pendukung dan Komponen Cadangan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hidayat mendukung sikap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang menegaskan penolakan Republik Indonesia terhadap klaim Tiongkok mengenai perairan Natuna.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Polemik Laut Natuna Utara

Slamet Minta Pemerintah Hadir

Kata kunci dari persoalan di Natuna yakni eksistensi. Pemerintah atau nelayan Indonesia harus selalu hadir di Laut Natuna Utara untuk menunjukkan bahwa Indonesia berdaulat atas wilayah tersebut,

drh. H. SLAMET

Anggota Komisi IV DPR RI

Sukabumi (11/01) — Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) drh Slamet, angkat suara terkait munculnya polemik soal Laut Natuna Utara. Mengutip pernyataan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim, Slamet mengatakan, kembalinya kapal-kapal asing tersebut disebabkan kayanya sumberdaya perikanan, seperti: ikan tuna, cakalang, dan tongkol, dimana jenis ikan tersebut bernilai ekonomi tinggi. Selain itu, Laut Natuna Utara juga kaya akan sumberdaya minyak dan gas. Ini yang diincar China.

"Kata kunci dari persoalan di Natuna yakni eksistensi. Pemerintah atau nelayan Indonesia harus selalu hadir di Laut Natuna Utara untuk menunjukkan bahwa Indonesia berdaulat atas wilayah tersebut," ucap Slamet kepada

wartawan Jumat (10/1/2020).

Slamet menjelaskan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dibawah kepemimpinan Susi Pudjiastuti, telah melarang aktivitas kapal nelayan berukuran 150 GT untuk hadir di Laut Natuna Utara, karena dianggap menimbulkan kerusakan lingkungan.

"Kebijakan tersebut membuat perairan ZEE Natuna kosong, sehingga kapal China dengan luluasa masuk," tambah legislator asal Sukabumi ini

Menteri Susi Pudjiastuti, kata Slamet, mengutip pernyataan pengamat transportasi darat dan laut, Bambang, telah menerbitkan Peraturan Dirjen Tangkap melalui SE No D1234/DJPT/PI470D4/31/12/2015 tentang Pembatasan Ukuran GT Kapal Perikanan pada Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)/SIPI/SIKPI.

"Peraturan ini membatasi aktivitas kapal nelayan tanah air. Akibatnya ribuan kapal nelayan dengan GT diatas 150 GT, tidak boleh beroperasi. Kapal kapal bertonasi besar ini mangkrak di Muara Baru, Muara Angke, Indramayu, Pekalongan, Pati, dan Banyuwangi. Sedangkan kapal-kapal kecil tidak mampu mencapai perairan ZEE," jelas Slamet.

Slamet berharap, KKP di bawah Menteri Edhy Prabowo, dapat merevisi kebijakan menteri pendahulunya agar ZEE Indonesia di Laut Natuna kembali diramaikan oleh nelayan-nelayan Indonesia untuk memanfaatkan sumberdaya perikanan sekaligus menjaga kedaulatan Negara di wilayah tersebut.

"Saya mengapresiasi Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Purbaya Yudhi Sadewa, yang mengatakan pihaknya akan menempatkan satu kapal tanker yang memuat bahan bakar dan keperluan lain di perairan Natuna. Sehingga nelayan tidak perlu bolak balik ke pantai hanya untuk mengisi bahan bakar yang habis," tandasnya.





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Natuna Kedaulatan NKRI, Titik!

"Natuna kedaulatan NKRI, titik! Tidak ada selisih pandang terhadap Natuna sebagai wilayah NKRI dari perspektif hukum internasional. Klaim Tiongkok atas Natuna adalah klaim sepihak yang melanggar hukum internasional. Tidak perlu ada negosiasi dan kompromi"

Dr. H. Jazuli Juwaini, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI



DPR Tagih Janji Pemerintah Jalankan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani



Jakarta (08/01) --- Anggota DPR MPR, Slamet meminta kepada pemerintah untuk segera melaksanakan undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang hingga sekarang belum juga dilaksanakan.

Padahal, undang-undang ini telah lahir sejak 6 Agustus tahun 2013, lima bulan lebih awal dari ketok palu dari undang-undang Desa yang di ketok pada 15 Januari 2014.

Politisi PKS asal Sukabumi, Jawa Barat ini

menyayangkan, undang-undang Desa yang termaktub pada undang-undang RI nomor 6 tahun 2014 sudah terlaksana secara cepat, sedangkan undang-undang RI nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, hingga kini belum juga dapat diimplementasikan.

"Saya sangat menyayangkan, 5 tahun pemerintahan Jokowi periode pertama belum mampu merealisasikan amanat undang-

undang RI nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Padahal persoalan pertanian semakin hari semakin kompleks dan semakin perlu mendapat dukungan payung hukum dari pemerintah. Realitas yang terjadi saat ini adalah, jumlah petani dan lahan pertanian makin berkurang. Dan yang paling miris adalah, minat generasi muda untuk menjadikan pertanian sebagai agrobisnis semakin jauh kenyataan", urai Slamet.

Anggota DPR yang kini duduk di Komisi IV ini menyoroti betapa banyak persoalan yang perlu diselesaikan bila merujuk undang-undang no 19 tahun 2013 ini.

Ia mencontohkan pada tanggung jawab pemerintah pada pasal 16 undang-undang ini, yakni pada tanggung jawab pemerintah menyediakan dan mengelola prasarana pertanian yang meliputi, Jalan usaha tani, Jalan produksi dan jalan desa ; Bendungan, dam, jaringan irigasi dan embung ; dan Jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan dan pasar.

"Ini sangat sejalan dengan undang-undang desa yang tujuan utamanya memberikan

Saya berharap pemerintah segera merealisasikan amanat UU ini sehingga perencanaan pemberdayaan dan perlindungan petani dapat dilakukan secara sistematis, dan menyeluruh

drh. H. SLAMET

Anggota Komisi IV DPR RI

perataan di seluruh wilayah dan memperkecil gini rasio pada tiap-tiap wilayah di Indonesia. Hal ini disebabkan karena masyarakat petani kita yang total bekerja sebagai petani mencapai 35,9 juta orang per April 2019, mayoritas berada di wilayah perdesaan", ungkapnya.

Slamet menambahkan, bahwa saat ini sektor pertanian semakin tidak diminati akibat berbagai faktor. faktor-faktor itu misalnya minimnya arahan atau motivasi sebagai petani, tidak adanya jenjang karir dan kurang menjanjikan, rentan gagal, hingga anggapan identik dengan profesi orang miskin desa.

"Keadaan ini diperparah dengan adanya tidak diimplementasikannya undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani", pungkas Slamet.

Sebagai bukti kata Slamet, adalah Jumlah petani muda berusia kurang 25 tahun sampai 44 tahun hanya sebesar 7.361.767 orang atau 38,14 persen sesuai dengan analisa BPS lima tahun terakhir yang di rilis pada Oktober 2019.

"Saya berharap pemerintah segera merealisasikan amanat Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini sehingga perencanaan pemberdayaan dan perlindungan petani dapat dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel, kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan pasal 5 undang-undang ini", tutup Slamet. Foto : dpr.go.id

Ahmad Syaikh Desak Pemerintah Pusat dan Daerah Duduk Bersama Atasi Banjir

Banjir memang tidak dapat dihindari. Apalagi jika curah hujan sangat tinggi dan durasinya lama seperti yang terjadi pada 1 Januari lalu. Tapi pemerintah dapat meminimalisir jika bisa terus berkomunikasi dan duduk bersama pemerintah daerah.

H. AHMAD SYAIKHU

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jabar VII

Bekasi (09/01) — Banjir di Jabodetabek menelan korban jiwa dan harta benda yang tak sedikit. Banyak pihak menganggap ini terjadi karena upaya pencegahan banjir oleh pemerintah belum optimal. Itu dapat dilihat dari belum tuntasnya rencana strategis menanggulangi banjir yang sudah disusun sejak lama, seperti Sodetan Ciliwung.

Menyikapi ini, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Ahmad Syaikh meminta pemerintah pusat dan daerah kembali duduk bersama agar persoalan banjir bisa teratasi.

Menurut Syaikhu yang diamanahi di Komisi V DPR, banjir memang tidak dapat

dihindari. Apalagi jika curah hujan sangat tinggi dan durasinya lama seperti yang terjadi pada 1 Januari lalu. Tapi pemerintah dapat meminimalisir jika bisa terus berkomunikasi dan duduk bersama pemerintah daerah.

Syaikhu menyinggung soal perdebatan di ruang publik antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Keduanya berselisih pendapat soal penanganan banjir. Basuki menggunakan konsep normalisasi, sedangkan Anies memakai istilah naturalisasi.

"Ini tidak elok. Saat

masyarakat terkena banjir, yang muncul justru perdebatan yang tidak perlu. Seharusnya Pusat dan Daerah duduk bersama," ujar Syaikhu.

Syaikhu menyoroti proyek Sodetan Ciliwung yang membutuhkan kerjasama Pemerintah Pusat dan DKI Jakarta. Sodetan Ciliwung merupakan proyek penangkal banjir yang digagas saat Jakarta dilanda banjir besar pada tahun 2012. Sodetan ini menghubungkan Sungai Ciliwung dengan Banjir Kanal Timur (BKT).

Proyek ini diharapkan mampu mengalirkan air sungai Ciliwung ke BKT. Bila sodetan ini beroperasi, beban di Pintu Air Manggarai dapat dikurangi. Namun, proyek ini tersendat karena pembebasan lahan. Hingga kini dari 1,2 km sodetan yang mau dibangun, baru selesai 600 m.

Menurut Basuki, pihaknya masih menunggu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal pembebasan lahan proyek. Basuki menjelaskan 600 m proyek yang selesai sudah mandek sejak tahun lalu tanpa pengerjaan lanjutan.

"Hal semacam ini seharusnya tidak terjadi kalau

komunikasi antara Pusat dan daerah intensif dilakukan," kata Syaikhu.

Syaikhu juga menyoroti penanganan banjir oleh pemerintah yang masih belum maksimal. Soal perahu karet, misalnya. Dia melihat masih sangat minim.

"Saya banyak dapat pesan dari masyarakat utk meminta bantuan perahu karet. Karena mereka terjebak banjir dan belum ada bantuan yang datang dari aparat pemerintah," ungkap Syaikhu.

Perahu karet ini harus jadi prioritas. Sebab skala banjir setiap tahun cenderung meningkat dan meluas. Pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk pengadaannya.

"Pengadaan perahu karet itu salah satu langkah antisipatif

yang bisa kita lakukan. Harus dialokasikan anggarannya," pungkask Syaikhu.

Berdasarkan data BNPB, ada 169 titik banjir di seluruh wilayah Jabodetabek dan Banten.



PKS Tolak Rencana Impor Gas

Jakarta (11/01) — PKS menolak rencana Pemerintah melakukan impor gas untuk menekan harga jual ke kalangan industri. Menurut Wakil Ketua FPKS DPR RI, Mulyanto, impor bukan solusi tepat untuk mengatasi harga jual gas yang dinilai masih tinggi.

Pemerintah, kata Mulyanto, jangan terjebak oleh permainan spekulasi impor yang mengiming-imingi harga murah di awal tapi justru akan merusak tata kelola gas dalam negeri.

"Untuk jangka pendek opsi impor mungkin terkesan menarik karena pihak produsen menjanjikan harga lebih murah. Tapi kita tidak bisa jamin harga ini bisa berlaku untuk jangka waktu yang lama," tegas Mulyanto.

Dari pada mengimpor gas, kata Mulyanto, sebaiknya Pemerintah melakukan efisiensi produksi dan transportasi. Sejauh ini tingginya harga gas ke kalangan industri justru disebabkan oleh tingginya harga produksi di hulu dan transportasi.

"Pemerintah jangan hanya mencari manfaat jangka pendek. Kalau impor gas dilakukan bukan tidak mungkin

justru akan mengganggu keberadaan kilang-kilang gas yang berproduksi selama ini," ujar Mulyanto.

Selain efisiensi Mulyanto juga mendesak Pemerintah untuk menambah kuota Domestic Market Obligation (DMO). Hal ini perlu untuk menjamin ketersediaan gas bagi kalangan industri dan masyarakat. Apalagi paradigma kebijakan energi kita kan menjadikan gas bukan sekedar komoditas ekonomi, tetapi gas sebagai sumber daya untuk mendorong pembangunan.

"Kita dukung kebijakan pemerintah untuk meningkatkan DMO gas untuk menurunkan harga jual gas. Tapi kalau impor, kita akan tolak," tegas Anggota Komisi VII, DPR RI ini.

Menurut Mulyanto, saat ini saja defisit neraca berjalan Indonesia sudah besar akibat impor minyak olahan, yang berkontribusi mencapai 30% dari total defisit transaksi berjalan. Angka ini dipastikan akan naik jika ditambah adanya impor gas.



Daripada mengimpor gas, sebaiknya Pemerintah melakukan efisiensi produksi dan transportasi. Sejauh ini tingginya harga gas ke kalangan industri justru disebabkan oleh tingginya harga produksi di hulu dan transportasi.

Dr. H. MULYANTO, M.Eng
Anggota Komisi VII DPR RI

Konflik Iran-AS Memanas

Iskan : Tak Bisa Diprediksi, Pemerintah Harus Bersikap!

Jakarta (10/01) — Konflik Negara Iran dan Amerika kian memanas Setelah tewasnya Komandan Pasukan Quds pada Garda Revolusi Iran, Mayor Jenderal Qassem Soleimani, yang dibunuh Amerika Serikat (AS) di Baghdad, Irak pada tanggal 3 Januari 2020, setidaknya 10 orang Tewas dalam serangan tersebut.

Tak berapa lama dari serangan itu, Iran melancarkan serangan balas dendamnya dengan meluncurkan Puluhan Rudal yang dinamai "Rudal Soleimani" diluncurkan ke arah target pangkalan udara Ain al-Asad di Irak, yang menjadi markas tentara AS pada tanggal 8 Januari 2020.

Anggota BKSAP (Badan Kerjasama antar parlemen) DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba menyampaikan sebenarnya yang dilakukan Donald Trump itu perbuatan yang tak bisa ditolerir

"Kunjungan Qassem Soleimani ke Irak merupakan kunjungan resmi delegasi sebuah negara ke negara lain sehingga tindakan Trump merupakan provokasi yang bisa menimbulkan konflik lebih

luas", ungkap Iskan.

Iskan menambahkan Soleimani itu dianggap warga negara Iran sebagai Martir dan Pahlawan, lihat saja dari gegap gempitanya seluruh warga mengantar Jenazahnya bahkan pimpinan Palestina, Ismail Hanniyah dari faksi HAMAS juga turut hadir di pemakaman Soleimani walaupun ada perbedaan yang jauh terkait ideologi, yang satu syiah, yang lainnya sunni, tetapi Palestina tak melupakan Puluhan Iran.

Selain itu, Iskan mengatakan ketegangan AS dan Iran mulai memanas, ketika AS dipimpin oleh Donald Trump, mulai dari bubarnya kesepakatan nuklir tahun 2015, kemudian di tahun 2018 embargo dan pembatasan kerjasama yaitu dibidang minyak, mobil, aeronautika dan perbankan yang dilakukan AS terhadap Iran sehingga membuat perekonomian Iran terdampak sangat buruk.

"Tetapi kalau ada yang mengait-ngaitkannya ke perang dunia ketiga ? Saya rasa ini juga terlalu berlebihan, semua pihak pasti paham betul dengan kondisi keamanan global yang

begitu rumit, seperti masalah ekonomi dan tatanan dagang internasional." Ujar Iskan.

Iskan juga menyampaikan agar pemerintah Indonesia segera ambil sikap atas situasi global saat ini, situasi yang tak bisa diprediksi ini bisa menimbulkan masalah baru bagi negara kita.

"Lakukan evakuasi WNI ditempat aman, baik itu dinegara Irak, Iran dan negara sekitarnya. Juga pemerintah harus segera melakukan tindakan preventif di segala bidang, khususnya dibidang perekonomian, atas situasi global saat ini. Agar konflik AS-Iran maupun konflik Natuna tidak berdampak pada perekonomian Indonesia" Tutup Iskan.

Foto
dpr.go.id

Lakukan evakuasi WNI ditempat aman, baik itu dinegara Irak, Iran dan negara sekitarnya. Juga pemerintah harus segera melakukan tindakan preventif di segala bidang, khususnya dibidang perekonomian, atas situasi global saat ini. Agar konflik AS-Iran maupun konflik Natuna tidak berdampak pada perekonomian Indonesia"

H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI



KECEWA SOAL IURAN BPJS

Komisi IX DPR akan Panggil Menkes dan Direktur BPJS Kesehatan

Mana janjimu? Sebab dalam rapat, khusus kelas tiga mandiri tidak ada kenaikan dan akan dibuatkan solusi yang terbaik. Insya Allah pada saat rapat sidang pertama kali tanggal 13 Januari 2020, kami dari fraksi PKS, akan mengusulkan agar segera digelar rapat kembali dengan BPJS (Kesehatan)

H. ALIFUDDIN, SE,MM

Anggota Komisi IX DPR RI

Pontianak (07/01) — Komisi IX DPR RI akan memanggil Menteri Kesehatan dan Direktur BPJS Kesehatan untuk dimintai klarifikasinya, terkait iuran BPJS Kesehatan yang kembali menuai protes masyarakat.

Pasalnya, saat rapat dengan kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan, telah disepakati jika iuran peserta mandiri khususnya untuk Kelas III tidak mengalami kenaikan. Namun, per 1 Januari 2020, banyak peserta BPJS Kesehatan

yang mengeluhkan kenaikan iuran asuransi tersebut.

“Jadi mengenai BPJS (Kesehatan) kami telah menyampaikan kepada masyarakat khususnya di Kalbar, tidak ada kenaikan untuk peserta mandiri kelas tiga mandiri. Ternyata, mulai 1 Januari 2020, untuk kelas tiga mandiri tetap naik. Ini sangat kami sesalkan,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Dapil Kalbar H. Alifudin, di Pontianak, Minggu (5/1/2020).

“Mana janjimu? Sebab dalam rapat, khusus kelas tiga mandiri tidak ada kenaikan dan akan dibuatkan solusi yang terbaik. Insya Allah pada saat rapat sidang pertama kali tanggal 13 Januari 2020, kami dari fraksi PKS, akan mengusulkan agar segera digelar rapat kembali dengan BPJS (Kesehatan),” timpalnya.

Alifudin merasa kecewa karena Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan seolah tidak menggubris hasil rapat sebelumnya. Sehingga iuran BPJS Kesehatan untuk Kelas III tetap naik di awal tahun. Hal ini dinilai Alifudin, sangat memberatkan masyarakat yang tidak mampu.

“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, khususnya masyarakat yang tidak mampu. Kami dari Komisi sembilan merasa tertinggung, karena kesepakatannya tidak dilaksanakan,” tandasnya.



PKS Dorong Pembentukan Pansus BPJS Kesehatan

Pemerintah tidak konsisten dengan hasil rapat dengan Komisi IX DPR yang digelar beberapa waktu lalu karena menaikkan iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020 lalu. Tidak menutup kemungkinan kami mengusulkan dibentuk Pansus BPJS Kesehatan karena menyangkut hajat serta hak rakyat Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYANTI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS

Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidayanti menyatakan akan mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Menurutnya, pemerintah tidak konsisten dengan hasil rapat dengan Komisi IX DPR yang digelar beberapa waktu lalu karena menaikkan iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020 lalu.

"Tidak menutup

kemungkinan kami mengusulkan dibentuk Pansus BPJS Kesehatan karena menyangkut hajat serta hak rakyat Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945," kata Kurniasih lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Rabu (8/1).

Dia menerangkan komisinya akan langsung mengadakan rapat dengan seluruh pemangku kepentingan terkait BPJS Kesehatan setelah masa sidang II DPR dibuka pekan depan, Senin (13/1).

Di sisi lain, Kurniasih

menyatakan iuran BPJS Kesehatan kelas III Mandiri hanya merupakan satu dari sejumlah persoalan di tubuh BPJS Kesehatan.

Menurutnya, terdapat dimensi lain terkait perbaikan BPJS Kesehatan yang perlu dikawal Komisi IX DPR seperti tentang kualitas pelayanan, pendataan penerima bantuan iuran (PBI), hingga dugaan penipuan.

"Pada rapat nanti kami juga meminta komitmen perbaikan dan solusi atas persoalan-persoalan BPJS Kesehatan," ucap Kurniasih.

Iuran BPJS Kesehatan sudah resmi naik hingga dua kali lipat per 1 Januari 2020. Kenaikan iuran ini juga berlaku bagi sistem pembayaran via e-commerce, Tokopedia.

Selain tertera dalam aplikasi BPJS Kesehatan atau Mobile JKN. Jumlah tagihan baru BPJS Kesehatan tersebut juga sudah dicantumkan pada aplikasi Tokopedia. Artinya, tarif premi BPJS Kesehatan yang harus dibayarkan masyarakat sudah menggunakan tarif baru per 1 Januari 2020.

Foto : dpr.go.id



Kemendikbud Harus Punya Skema Perbaikan Sarpras Pendidikan

Perbaikan GTK dan Sarpras merupakan yang paling krusial dari Standar Nasional Pendidikan (SNP). Khusus untuk Sarpras, untuk meminimalkan kasus ambruknya sekolah

Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Jakarta (08/01) --- Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mengatakan bahwa pihaknya telah memberikan rekomendasi terkait dengan pembenahan sarana prasarana (sarpras) pendidikan. Keberadaan sarpras pendidikan yang baik dinilai sebagai salah satu penunjang terciptanya proses belajar bermutu.

"Sejak awal pertemuan dengan Kemendikbud, kami di DPR sudah menyampaikan dua rekomendasi yang harus segera dilakukan. Yaitu solusi Guru atau Tenaga Kependidikan (GTK) dan benahi sarana prasarana (sarpras)," kata Fikri kepada Validnews, Senin (6/1).

Hal itu diungkapkan terkait dengan ambruknya atap

bangunan di SD Negeri Cirimekar 02, Cibinong, Bogor karena hujan deras dan angin kencang, pada Rabu (1/1). Akibatnya, tiga ruang kelas, ruang guru, dan ruang IT rusak parah dan tidak dapat digunakan. Sebanyak 203 siswa kelas 4 sampai 6 terpaksa belajar di tenda darurat.

Fikri yang merupakan mantan Ketua Panja Sarpras Dikdasmen Komisi X itu menilai, perbaikan GTK dan Sarpras merupakan yang paling krusial dari Standar Nasional Pendidikan (SNP). Khusus untuk Sarpras, untuk meminimalkan kasus ambruknya sekolah, pihaknya memberikan rekomendasi kepada Kemendikbud.

Kemendikbud diminta untuk memiliki skema penyelesaian terhadap 1,3 juta ruang kelas rusak (ringan, sedang, berat), dari total 1,8 juta ruang yang ada di Indonesia.

"Maka itu saya minta Kemendikbud dengarkan rekomendasi DPR ini. Kalau tidak segera, ya siapapun menteri juga hal seperti ini kemungkinan bisa terjadi lagi sangat besar," paparnya.

Kejadian sekolah ambruk bukan yang pertama kali, sebelumnya juga Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Nahdatul Wathan (NW) di Dusun Kwang Jukut, Desa Pringgerate, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ambruk pada 3 September 2019 lalu dan mengakibatkan puluhan siswa luka-luka.

Kemudian, disusul SDN Gentong di Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur yang roboh pada, Selasa 5 November 2019 yang menyebabkan dua orang meninggal dunia serta 11 siswa lainnya mengalami luka-luka. Foto : dpr.go.id





Training Bisnis Online, Dalam rangka mendorong lahirnya Wirausaha-Wirausaha Muda yang mampu mengikuti perkembangan teknologi,

Kegiatan Reses - H. Rofik Hananto, S.E.



Dorong Lahirnya Wirausaha Muda, Rofik Hananto Adakan Training Bisnis Online

Saya yakin meski kita hidup di daerah atau desa yang tidak dekat dengan daerah-daerah metro atau kota-kota besar, tapi saya yakin bahwa dunia hari ini membuat sebuah proyeksi baru, sebuah gambaran baru bahwa kekuatan ekonomi dunia hari ini akan lahir dari desa-desa

H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah VII

Purbalingga (09/01) — Rofik Hananto, Anggota DPR RI Fraksi PKS mengadakan kegiatan pelatihan bisnis online di rumahnya di Perumahan GPA C-3 Karangsentul, Padamara, Purbalingga-Jawa Tengah, Rabu, 08/01/2020.

Dalam rangka mendorong lahirnya Wirausaha-Wirausaha Muda yang mampu mengikuti perkembangan teknologi, di Masa Reses Persidangan I Rofik Hananto mengadakan acara Training Bisnis Online dan menghadirkan CEO Kampung Marketer, Nofi Bayu Darmawan.

Acara ini mendapat respon yang sangat positif, terbukti meski sore itu hujan lebat, ternyata antusiasme peserta

yang hadir untuk mengikuti acara ini sangat tinggi, hampir 300 peserta anak muda dari target awal panitia hanya 150 peserta.

Acara training ini tidak hanya diikuti oleh anak muda yang berasal dari dapil Jateng VII saja (Kabupaten: Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen) tetapi juga dari Kabupaten Banyumas bahkan kabupaten Cilacap.

“Saya yakin meski kita hidup di daerah atau desa yang tidak dekat dengan daerah-daerah metro atau kota-kota besar, tapi saya yakin bahwa dunia hari ini membuat sebuah proyeksi baru, sebuah gambaran baru bahwa

kekuatan ekonomi dunia hari ini akan lahir dari desa-desa”, ungkap Rofik.

Kekuatan ekonomi Indonesia bahkan dunia, kata Rofik, akan tumbuh dan akan mandiri berdaya dimulai dari berkembangnya, tumbuhnya ekonomi-ekonomi berbasis desa.

“Karena semua potensi masa depan di Indonesia, bahkan di dunia, semuanya tersedia di desa; air yang bersih, udara yang segar, kekayaan dan sumber daya alam yang melimpah, wisata yang penuh pesona, anak-anak muda yang kreatif, anak muda dan masyarakat desa yang tangguh, ulet, yang pantang menyerah dan berani hidup susah, itu adanya di desa. Sehingga kita memiliki potensi yang sangat besar”, pungkasnya.

Anggota DPR RI yang juga merupakan pengusaha Purbalingga menambakan “Dunia hari ini menuntut kita untuk mampu mengikuti dan menguasai perkembangan teknologi informasi, khususnya sosial media, agar semua potensi yang kita miliki dapat kita explore dan maksimalkan sehingga mampu menjadi sumber pendapatan”, tutur Rofik.

Di akhir sambutannya

Rofik Hananto berharap, anak muda hari ini harus mampu mengoptimasi potensi ekonomi desa yang beraneka ragam. Bahwa hidup berdaya dan mandiri tidak harus di kota, tapi di desa juga bisa bahkan peluangnya sangat besar.

Pada acara training ini, Pemateri Nofi Bayu Darmawan, pria yang juga pernah mendapatkan Penghargaan Liputan6 SCTV Award 2018 menyampaikan sejumlah langkah yang harus dilakukan, mulai dari menentukan produk

yang akan dipasarkan, mencari channel marketing yang pas dengan bisnis yang dijalankan, memilih akun bisnis, dan menentukan harga jual.

Peserta juga dikenalkan bagaimana membuat website, memasarkan produk lewat fanpage, facebook marketplace, facebook ads dan lainnya.

Salah seorang peserta mengatakan: “Acaranya bermanfaat banget, materinya berkelas, semoga lain waktu bisa diadakan lagi” tutur Naufi peserta dari Purbalingga.



Hermanto Minta Panitia Penas XVI Antisipasi Musim Kemarau

Lokasi ini cocok untuk pameran, gelar peragaan teknologi dan inovasi baru di bidang pertanian. Namun segenap jajaran panitia harus mengantisipasi kekurangan air saat kegiatan berlangsung

Dr. HERMANTO, S.E., M.M.

Anggota Komisi IV DPR RI / Dapl Sumbar

menyatakan siap mengantisipasi musim kemarau.

Ia optimis demikian karena tidak jauh dari lokasi tersebut ada sungai yang cukup besar. Kebutuhan air bisa tercukupi dengan menyedotnya dari sungai tersebut.



Kab. Padang Pariaman (07/01) — Anggota DPR RI Hermanto dalam perjalanan resepsioner perorangnya di Sumatera Barat menyempatkan diri meninjau perkembangan kesiapan lokasi Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (Penas KTNA) XVI yang rencananya digelar Tanggal 20-25 Juni 2020.

Lokasi yang ditinjau tersebut adalah gedung Asrama Haji dan ladang seluas 35 ha disekitarnya di Kabupaten Padang Pariaman.

"Lokasi ini cocok untuk pameran, gelar peragaan teknologi dan inovasi baru di bidang pertanian. Namun

segenap jajaran panitia harus mengantisipasi kekurangan air saat kegiatan berlangsung", ujar Hermanto kepada para pejabat dari Dinas Pertanian Kabupaten Padang Pariaman yang menyertainya dalam kunjungan tersebut.

Menurutnya, pertengahan Juni diperkirakan merupakan puncak musim kemarau. Sementara kegiatan dilakukan di areal ladang.

"Biasanya di areal ladang itu kalau musim kemarau, airnya sulit", ucap legislator FPKS dari dapil Sumbar 1 ini.

Menanggapi peringatan tersebut, pejabat Dinas Pertanian setempat



Bertemu Pimpinan Perguruan Tinggi

Nasir Jamil Ajak Semua Berkolaborasi Bangun SDM

peran perguruan tinggi telah lama dirasakan bermanfaat dalam mengisi pembangunan di Aceh. Karena itu Forbes berkomitmen melanjutkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sejumlah program yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Aceh

H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si

Anggota Fraksi PKS DPR RI / Dapil Aceh

Aceh (07/01) — Ketua Forum Bersama Anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh, M Nasir Djamil mengingatkan para pimpinan perguruan tinggi di Aceh yang tergabung dalam Forum Rektor Aceh, bahwa pendidikan tinggi saat ini dihadapkan dengan situasi volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas.

"Kondisi ini tentu membutuhkan kelincahan dan kolaborasi perguruan tinggi dan swasta", ungkap Nasir saat Forbes dengan jajaran rektor perguruan tinggi dan swasta, baik berlabel agama ataupun

umum di Aceh yang berlangsung di Aula BPSDM Aceh, Selasa, (07/01/2020).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari masa reses anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh. Hadir juga Tgk Fadhil Rahmi Lc, TA Khalid, Illiza Saaduddin Djamal dan Rafli Kande.

Menurut Nasir Djamil, peran perguruan tinggi telah lama dirasakan bermanfaat dalam mengisi pembangunan di Aceh. Karena itu Forbes berkomitmen melanjutkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sejumlah

program yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Aceh.

Diantaranya adalah pembangunan sarana dan prasarana di kampus dan beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu dan memiliki prestasi akademik.

"Forbes menilai perguruan tinggi di Aceh harus dibenahi dalam berbagai aspek agar peringkatnya lebih baik secara nasional", ujarnya.

Hadir dalam pertemuan itu antara lain, Rektor Universitas Muhammadiyah Muharir Asy'ari, IAIN Langsa Hasan Basri, Unsyiah Prof Marwan, Universitas Malikul Saleh Herman Fitra, Universitas Kebangsaan Islam Indonesia Bireuen Marwan.

Dalam pertemuan itu Forbes mengharapkan agar para pimpinan perguruan tinggi di Aceh, baik umum dan agama, negeri dan swasta, dapat membentuk organisasi Forum Rektor Aceh.

"Forum rektor ini diharapkan berkolaborasi dengan Forbes sehingga harapan agar pendidikan tinggi di Aceh lebih baik akan terwujud", ujar Nasir Djamil



Usai Masa Reses

Rafli Sambangi Penyelenggara Pemerintahan di Aceh

Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan reses beberapa waktu lalu, dan sebelum kembali ke senayan kita juga sudah berkoordinasi dengan sejumlah elemen di Aceh. Harapan kita, semoga ikhtiar bersama terwujud menjadi sebuah jawaban kebutuhan rakyat

RAFLI

Anggota DPR RI Dapil NAD I

Banda Aceh (10/01) — Masa Reses pertama anggota DPR RI yang berlangsung sejak 18 Desember 2019, telah usai.

Selama berada di Dapil, Anggota DPR RI, Rafli sudah melakukan beragam kegiatan serapan aspirasi masyarakat di wilayahnya, hingga mengunjungi sejumlah kabupaten dalam dapil setempat.

Mengakhiri kunjungannya di dapil, usai masa reses, Rafli berkoordinasi dan melakukan rapat kerja dengan sejumlah unsur pemerintahan dari berbagai instansi di Provinsi berjulukan serambi mekah itu.

"Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan reses beberapa waktu lalu, dan sebelum kembali ke senayan kita juga sudah berkoordinasi dengan sejumlah elemen di Aceh, diantaranya Pemerintah Aceh, sejumlah Lembaga Keistimewaan Aceh, DPPRA, SKPA, Ormas, NGO, BPKS Sabang, Pengusaha, serta teristimewa menyerap aspirasi masyarakat di dapil. Harapan kita, semoga ikhtiar bersama terwujud menjadi sebuah jawaban kebutuhan rakyat" Ujar Rafli

Sebagaimana kalender kerja anggota DPR RI, akan kembali melaksanakan sidang paripurna pada Senin 13 Januari 2020 di Senayan, Jakarta, menjadi alarm berakhirnya kegiatan di dapil awal tahun ini.



Gelar Reses

Sakinah Aljufri Bertemu Bupati Poso

Saya sangat mendorong rencana pindah-nya stadion di seputaran kelurahan Lembomawo yang merupakan daerah pengembangan kota Poso”

Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag

Anggota Komisi X DPR RI / Dapl Sulawesi Tengah

Poso (07/01) — Sakinah Aljufri, Anggota DPR RI Fraksi PKS dalam kegiatan Reses masa persidangan I melakukan pertemuan dengan Bupati Poso Darmin A. Sigilipu beserta jajaran pemerintah di Kantor Pemkab Poso, Minggu, (29/12/2020).

Dalam pertemuan tersebut, Sakinah Aljufri mengatakan, akan membantu Poso dalam rangka pembangunan stadion olahraga Poso.

" Saya sangat mendorong rencana pindahnya stadion di seputaran kelurahan Lembomawo yang merupakan daerah pengembangan kota Poso", ungkap Sakinah.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Poso menyambut

positif kunjungan Sakinah Aljufri dan mengharapkan dukungan dari Anggota DPR RI.

"terutama advokasi anggaran untuk pendidikan, pariwisata serta olahraga, demi kemajuan Poso kedepan", ujarnya.

Turut hadir dalam kunjungan ini Anggota DPRD Kabupaten Poso Usman Abdul Karim dan Muhammad Yusuf serta pengurus DPD PKS Kabupaten Poso Amir Kusa.





Partai kami (PKS) pun akan terus berupaya semaksimal mungkin membantu sampai pada pasca banjir secara bersama dan bahu membahu, dan itu adalah cara jitu menolong saudara-saudara kita yang menjadi korban

Membantu Korban Banjir - H. Mahfudz Abdurrahman, S.Sos

Masa Reses, Mahfudz Abdurrahman Instruksikan Tim Bantu Korban Banjir

Partai kami (PKS) pun akan terus berupaya semaksimal mungkin membantu sampai pada pasca banjir secara bersama dan bahu membahu, dan itu adalah cara jitu menolong saudara-saudara kita yang menjadi korban

MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VI

Bekasi (06/01) — Anggota DPR RI Mahfudz Abdurrahman kunjungan lokasi banjir di Kota Bekasi, Kamis (2/1). Politisi Dapil 6 Jawa Barat yang juga petinggi PKS ini pun memberikan bantuan kepada korban banjir.

Sejak musibah banjir yang melanda wilayah JABODETABEK di awal tahun 2020, khususnya Kota Bekasi, Mahfudz bereaksi cepat dengan menginstruksikan tim dan relawannya untuk turun langsung membantu para korban banjir.

Selain itu, Mahfudz juga mendatangi warga terdampak banjir yang menninggal dunia akibat terbawa arus banjir dan

posko pengungsian di Jl. Mawar 2 Kel. Kalibaru Kecamatan Medan Satria.

Kemudian Mahfudz melanjutkan kunjungannya ke wilayah korban banjir dan dapur umum kampung Teluk Buyung Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara.

"Ini semua musibah ada hikmah yang bisa kita petik dari kejadian ini, dari pengamatan saya Bekasi adalah termasuk yang paling parah dalam kejadian banjir ini, warga Bekasi tidak sendiri, saya pribadi sudah menginstruksikan kepada tim dan relawan saya untuk turun langsung sejak hari

pertama membantu para korban banjir, dan partai kami (PKS) pun akan terus berupaya semaksimal mungkin membantu sampai pada pasca banjir secara bersama dan bahu membahu, dan itu adalah cara jitu menolong saudara-saudara kita yang menjadi korban," ujar Mahfudz Abdurrahman yang berasal dari Dapil Kota Bekasi Dan depok.

Lebih lanjut Mahfudz mengapresiasi setinggi-tingginya kepada semua tim dan Kepanduan PKS serta seluruh pihak yang sudah berjikab membantu para korban banjir, semoga kerja hebat dan cepat para relawan jadi amal baik.

Dalam kunjungan tersebut, Mahfudz Abdurrahman berdialog dengan para warga yang masih bertahan di pengungsian dan meninjau langsung dapur umum yang dikelola oleh para kader PKS bersama warga.

"Ucapan terima kasih ustadz Mahfudz atas kunjungan



dan bantuannya," Kerap kali terlontar dari warga korban banjir dan para pengungsi saat Mahfudz berdialog dengan warga.

Selain bahan makanan

Mahfudz Abdurrahman juga memberikan bantuan alat-alat kebersihan dan juga membentuk tim relawan bersih-bersih rumah yang diturunkan ke lokasi terdampak banjir.

Peran Pekerja Perempuan dalam Membangun Ekonomi Bangsa di Era Industri 4.0

Jakarta (09/01) — Anggota DPR RI, Anis Byarwati menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan DPP Serikat Pekerja Farmasi Kesehatan-Reformasi (Pharmaceutical Health Workers Union-Reformation) di Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.

Dalam FGD yang bertema "Peran Pekerja Perempuan dalam Pembangunan Ekonomi Bangsa Menghadapi Era Industri 4.0" ini, Anis hadir

sebagai Narasumber diantara 25 orang anggota Serikat Pekerja Farmasi Kesehatan-Reformasi se-Jakarta Timur.

Pada diskusi ini Anis yang juga Anggota Komisi XI menjelaskan tentang pengaruh Era Industri 4.0 terhadap industri kesehatan dan farmasi, tentang Artificial Intelligence (AI) saat ini yang banyak menggantikan peran pekerja manusia dengan teknologi elektronik digital dan robotic. Era baru Industrialisasi

Digital dapat menciptakan peluang dan ancaman bagi manusia. Menurut Anis, ancamannya dapat berupa hilangnya sekitar 1 - 1,5 miliar pekerjaan sepanjang tahun karena manusia digantikan mesin otomatis (Gerd Leonhard, Futurist).

"Namun akan ada peluang berupa bidang-bidang pekerjaan baru yang belum terbayangkan hingga kini. Indonesia juga tidak luput dari Era Industri Digital, contohnya

Agenda yang harus disiapkan perempuan pekerja di era 4.0, yaitu perempuan harus kreatif dan berpendidikan tinggi, serta memiliki kemampuan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk hal-hal positif.

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta I

adalah; Toko konvensional yang ada sudah mulai tergantikan dengan model bisnis toko online", ungkap Anis.

Agar kita bisa survive di era ini, lanjut Anis, kita harus memiliki kemampuan-kemampuan khusus yang tidak mungkin tergantikan oleh mesin atau elektronik digital.

"Beberapa kemampuan yang tak bisa tergantikan seperti; kemampuan kognitif, mengambil keputusan berdasarkan untung-rugi, kemampuan mengetahui dan membuat sistem, menyelesaikan masalah yang kompleks /complex problem solving, dan ketrampilan-ketrampilan sosial lainnya", pungkasnya.

Kemudian, kata Anis, Di era Industri 4.0, peran

perempuan di dunia kerja semakin penting. Semakin banyak peluang bagi perempuan untuk bekerja.

"Oleh karena itu, agenda yang harus disiapkan perempuan pekerja di era 4.0, yaitu perempuan harus kreatif dan berpendidikan tinggi, serta memiliki kemampuan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk hal-hal positif. Apalagi perempuan yang juga sebagai seorang ibu, ia perlu terbuka pemikirannya dan mau terus belajar mengikuti perubahan jaman dan teknologi yang tentunya berpeluang besar diikuti oleh perubahan perilaku, karakter dan sikap anak-anak yang hidup di jaman ini", tutup Anis di akhir diskusi.



Mudahkan Pengemudi Ojek, Slamet Berikan Bantuan Pom Bensin Mini

Tentu bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para tukang ojek di sini, Penyerahan bantuan yang juga masih dalam rangkaian agenda reses.

drh. H. SLAMET

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat IV

Sukabumi (06/01) — Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Slamet, memberikan bantuan stasiun pengisian bahan bakar mini atau pom mini bagi kelompok ojek taman strawberry kadudampit di Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi.

Penyerahan pom mini tersebut dilakukan Slamet pada Sabtu (4/1/2020) kepada perwakilan kelompok ojek di wilayah tersebut. Pemberian pom mini tersebut diharapkan bisa menjadi menjadi masalah pemberdayaan rakyat kecil.

"Tentu bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para tukang ojek di sini," ucap Slamet.

Penyerahan bantuan yang juga masih dalam rangkaian agenda reses ini, kata Slamet,

mendapat respon yang baik dari para tukang ojek. Pasalnya, bantuan berupa pom mini tersebut dalam menjadi salah satu alternatif penghasilan bagi para tukang ojek.

"Alhamdulillah mereka merespon positif pemberian bantuan ini. Ini juga tentunya sesuai dengan apa yang saya janjikan Tempo dulu kepada mereka," tambah Slamet.

Sementara itu, Koordinator kelompok ojek Dasep Alias Lasem menuturkan, pihaknya sangat mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Anggota DPR RI Komisi IV tersebut.

"Sangat berterimakasih dan harapan saya semoga bantuan yang diberikan Pak Slamet ini bisa meningkatkan perekonomian kami," pungkasnya.



Kunjungan Reses Thoriq Hidayat ke Kodim Tasikmalaya

“Sangat Penting berkomunikasi dan mendapatkan informasi langsung dari seluruh mitra kerja Komisi I terkait di daerah, agar tidak ada kendala terkait koordinasi,

KH TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi I DPR RI Dapil Jawa Barat IX

Tasikmalaya (08/01) — Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 dilaksanakan 18 Desember 2019 hingga 10 Januari 2020, Anggota Komisi I DPR RI, Thoriq Hidayat telah melakukan kunjungan reses ke kementerian dan lembaga di daerah pemilihannya yang menjadi mitra kerja Komisi I DPR RI.

Kunjungan Reses ini, kata Thoriq diharapkan akan menjadi langkah awal untuk saling berkomunikasi dan serap informasi.

“Sangat Penting berkomunikasi dan mendapatkan informasi langsung dari seluruh mitra kerja Komisi I terkait di daerah, agar tidak ada kendala terkait koordinasi,” kata anggota Komisi I ini di kantor KODIM Tasikmalaya, Tasikmalaya, Jawa

Barat, Senin (06/01/2020).

Kunjungan di Kodim Tasikmalaya ini disambut langsung oleh Letkol Inf. Imam Wijaksana Selaku Komandan Kodim Tasikmalaya.

Dalam kunjungan itu Thoriq menyampaikan pentingnya komunikasi dan menyerap informasi dengan Kodim Tasikmalaya selaku salah satu Mitra Kerja Komisi I.

Sementara itu Letkol. Inf. Imam Wicaksana menyampaikan berbagai kondisi Tasikmalaya.

“Penanganan isu radikalisme di Tasikmalaya harus menggunakan pendekatan Ekonomi”, ujar Komandan Kodim Tasikmalaya ini.

Penanganan isu radikalisme dengan cara persuasif ini merupakan solusi terbaik, menghindarkan

terbentuknya sikap antipati dan kekerasan.

Letko Inf. Imam Wicaksana menambahkan pihaknya mengaku bersyukur karena pendekatan Ekonomi ini didukung oleh Bank Indonesia.

“BI dan TNI bekerjasama dalam penyaluran uang di daerah-daerah terpencil”, ujarnya.

Tindakan Persuasif yang dilakukan oleh Kodim Tasikmalaya terkait isu Keamanan sangat disyukuri Thoriq Hidayat.

“Saya harap kedepan seluruh isu-isu keamanan, dapat diantisipasi dengan cara persuasif, sehingga yang timbul dari masyarakat adalah perasaan simpati kepada aparat”, terang Thoriq.

Thoriq menegaskan bahwa TNI tidak bekerja sendiri untuk menciptakan suasana Tasikmalaya yang kondusif, tetapi bekerjasama dengan Polri, pemerintah daerah dan para tokoh masyarakat.

“Dengan kerjasama tentunya segala gangguan keamanan dan acaman pertahanan terhadap daerah Tasikmalaya dapat dihindari”, tutup Thoriq.



Alifudin Siap Bantu Perjuangkan Fasilitas RSUD Soedarso Kalimantan Barat



Pontianak (09/01) — Alifudin, Anggota DPR RI Komisi IX dari Kalbar I melakukan kunjungan kerja perorangan ke Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (8/1/2020). Alifudin beserta rombongan diterima langsung oleh Gubernur Kalbar, Sutarmidji di ruangan kerjanya.

Dalam Kunjungan kerjanya kali ini, Alifudin menanyakan tentang fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh Rumah Sakit yang ada di Kalbar, serta pelayanan kesehatan untuk warga yang

berobat.

"Alhamdulillah Kunjungan kali ini selain mempererat silaturahmi kami kuga akan siap membantu yang terkait Komisi IX, seperti tadi dalam diskusi pak Gub mengatakan perlu peralatan yang canggih untuk menunjang rumahsakit yang canggih modern," ujarnya.

Alifudin juga menyinggung terkait kesiapan tenaga kerja, untuk itu Alifudin berharap Balai Latihan Kerja yang sudah ada bisa difasilitasi dengan peralatan

yang memadai.

Alifudin juga mengapresiasi Gubernur Kalbar terkait penanganan BPJS yang tanpa mengganggu APBD. Alifudin juga akan menjadwalkan kunjungan komisi IX ke Kalbar pada bulan Februari ini.

"Insha Allah kami akan jadwalkan bulan Februari ini Kalbar menjadi daerah yang akan dikunjungi oleh komisi IX, agar program-program Pemprov bisa menjadi prioritas bantuan dari Pusat," ujarnya.

Sutarmidji, Gubernur Kalbar berharap dengan adanya kunjungan dari Anggota DPR RI Komisi IX bisa membantu pengadaan fasilitas RSUD Soedarso.

"Alhamdulillah hari ini kami menerima kunjungan dari Pak Alifudin, Anggota DPR RI komisi IX, dengan bidang kerja kesehatan, ketenaga kerjaan, tadi saya menyampaikan kita sekarang sedang membangun RSUD Soedarso yang bagus, yang lebih modern, gedungnya biar kita yang bangun fisiknya, nah peralatannya biar kementerian, kita berharap Pak Alifudin bisa membantu untuk penganggarannya," ujarnya.

Terkait Ketenagakerjaan Sutarmidji, akan memprioritaskan sertifikasi, karena untuk

Insha Allah kami akan jadwalkan bulan Februari ini Kalbar menjadi daerah yang akan dikunjungi oleh komisi IX, agar program-program Pemprov bisa menjadi prioritas bantuan dari Pusat,

H. ALIFUDDIN, S.E.,M.M

Anggota Komisi IX DPR RI Dapil Kalbar I

lokasi dan peralatan BLK akan dimintakan dari kementerian tenaga kerja.

Sutarmidji juga berharap Kunjungan kerja Komisi IX DPR RI bisa terealisasi. "Mudah-mudahan nanti komisi IX bisa kun-

jungan ke Kalbar untuk melihat kondisi sebenarnya," katanya.

Sutarmidji juga mengajak Alifudin untuk mengunjungi ruangan pusat data dan informasi sebagai pusat kendali berbasis Teknologi Informasi.





Dr. H. Fahmi Alaydroes, M.M.,M.Ed
Doakan warga korban banjir dan tanah longsor
di Sukajaya Kabupaten Bogor

Pemerintah Perlu Perhatikan Sekolah Swasta

“Saya paham betul kompleksitas persoalan sekolah swasta. Namun, tidak boleh menyurutkan langkah perbaikan, buktikan bahwa sekolah swasta bisa lebih unggul dan diperhitungkan

Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Abdul Fikri Faqih, Wakil Ketua Komisi X DPR RI meminta agar pengelola sekolah swasta tidak berhenti untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan. “Saya paham betul kompleksitas persoalan sekolah swasta. Namun, tidak boleh menyurutkan langkah perbaikan, buktikan bahwa sekolah swasta bisa lebih unggul dan diperhitungkan,” ujar anggota dewan yang pernah menjabat sebagai kepala sekolah sebuah sekolah swasta itu pada diskusi pendidikan yang digelar Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota dan Kabupaten Tegal (6/1).

Diskusi tersebut juga menyoroti mudahnya akses mendirikan sekolah karena mengancam keberadaan sekolah swasta yang ada. Fikri

menyampaikan, perubahan pendidikan memang terjadi begitu cepat. Ia mendorong agar penyelenggara sekolah harus siap dengan segala perubahan yang mungkin terjadi. Menurut anggota Fraksi PKS ini, salah satunya dengan meningkatkan kualitas guru. Kualitas SDM menurutnya menjadi kunci bagi pendidikan.

Meski memiliki peran yang sangat vital, Fikri tidak menyangkal persoalan guru di tanah air masih banyak. Terlebih guru sekolah swasta. Ia menyebutkan persoalan tersebut tidak hanya soal kesejahteraan guru yang masih kurang. Di daerah, banyak guru swasta yang hanya memperoleh gaji ratusan ribu rupiah. Selain persoalan kesejahteraan tersebut, jumlah guru secara kuantitas masih kurang

memadai. “Saat ini secara nasional jumlah guru masih kurang 1,5 juta guru,” ujarnya.

Sejumlah pengurus BMPS yang hadir berharap mereka mendapat perhatian dari pemerintah. “Kami harap Pak Fiki dapat menyampaikan kepada pemerintah agar tidak hanya mengutamakan sekolah negeri tetapi juga perlu memperhatikan sekolah swasta,” ungkap Masfuad, Ketua BMPS Kota Tegal.



Mufida Dukung KBRI di Malaysia Hilangkan Praktik Percaloan

Saya mendukung berbagai upaya yang telah dilakukan oleh KBRI untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap PMI di Malaysia. Untuk itu juga saya minta KBRI berupaya menghilangkan percaloan dalam pelayanan PMI di KBRI baik calo pengurusan perpanjangan VISA maupun calo dalam hal lainnya

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYANTI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI Dapil DKI Jakarta II

Kuala Lumpur (07/01) — Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayanti meminta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia untuk menghilangkan praktik percaloan dalam melayani WNI, terutama Pekerja Migran Indonesia (PMI). KBRI juga diminta meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap PMI di Malaysia.

Mufida menyampaikan hal tersebut dalam kunjungannya di masa Reses ke KBRI di Malaysia, Senin (6/1/2020). Dalam kunjungan tersebut, Mufida diterima oleh Wakil Kepala Perwakilan KBRI di

Malaysia, Khrisna K.U Hannan dan Atase Tenaga Kerja, Budi H Laksana.

“Saya mendukung berbagai upaya yang telah dilakukan oleh KBRI untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap PMI di Malaysia. Untuk itu juga saya minta KBRI berupaya menghilangkan percaloan dalam pelayanan PMI di KBRI baik calo pengurusan perpanjangan VISA maupun calo dalam hal lainnya,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Mufida menjelaskan, PMI di Malaysia masih sering tertipu

oleh para calo dalam mengurus berbagai urusan di KBRI. Para PMI ini, bahkan sampai harus mengeluarkan uang senilai RM 300 kepada para calo.

ufida juga mengapresiasi langkah KBRI dalam meningkatkan sistem antrian perpanjangan paspor dengan sistem online dan pelayanan perpanjangan paspor di kilang-kilang.

“Termasuk juga upaya menambah fasilitas ruang dan kuota layanan di KBRI, bahkan dengan membuka layanan hingga 24 jam,” urai Mufida.

Diketahui, KBRI di Malaysia saat ini terus memperkuat hubungan G to G antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia. Karena itu, Mufida berharap, MoU yang sudah berakhir sejak 2016, segera diperpanjang dan diperbaharui.

“Ini diharapkan bisa memperkuat bargaining position Indonesia dalam tata kelola PMI di Malaysia sehingga para PMI lebih terlindungi hak-hak nya di tempat kerjanya masing-masing,” ujar Mufida.

Selain berkunjung ke KBRI, Mufida juga mengadakan pertemuan dengan Persatuan Pekerja Migran Indonesia

(PPMI) dan Serantau. Dalam pertemuan tersebut, banyak aspirasi PMI disampaikan kepada Mufida. Dari informasi yang didapatkan, PMI yang paling rentan teraniaya hak-hak nya adalah PMI sebagai Pekerja Rumah Tangga.

“Diantaranya tentang percaloan yang masih terjadi, sistem made online (SMO) yang memungkinkan perubahan visa

secara online di imigrasi Malaysia menjadi visa kerja tanpa proses dan pelibatan pemerintahan Indonesia, hingga pelaksanaan program back for good, yang banyak menimbulkan kerugian juga jadi catatan tersendiri. Apalagi Indonesia sendiri belum mempunyai UU perlindungan pekerja rumah tangga,” urai Mufida.



Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini Kembali Serahkan Gaji DPR Untuk Korban Banjir Banten

Hari ini kami datang untuk mengunjungi korban banjir Lebak untuk menyerahkan bantuan yang diperlukan sekaligus untuk melihat penanganan korban serta hal-hal yang harus dilakukan agar banjir tidak terjadi lagi di masa yang akan datang mengingat wilayah Lebak kerap terjadi banjir dari tahun ke tahun,”

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Lebak (8/1) – Musibah banjir dan longsor yang menimpa berbagai daerah membutuhkan penanganan dan bantuan berkelanjutan baik dari pemerintah maupun komponen masyarakat. Diantara wilayah yang terparah akibat banjir dan longsor adalah di Lebak Banten.

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini didampingi Ketua DPW PKS Banten Sanuji Pentamarta bersama jajaran pengurus dan tim Posko Bantuan PKS Lebak secara khusus mengunjungi korban

banjir Lebak dan menyerahkan bantuan yang didonasikan dari gaji DPR bulan Januari. Pekan sebelumnya Jazuli Juwaini juga telah mengirimkan bantuan kepada masyarakat Kabupaten Serang Banten yang juga terkena musibah banjir.

“Hari ini kami datang untuk mengunjungi korban banjir Lebak untuk menyerahkan bantuan yang diperlukan sekaligus untuk melihat penanganan korban serta hal-hal yang harus dilakukan agar banjir tidak

terjadi lagi di masa yang akan datang mengingat wilayah Lebak kerap terjadi banjir dari tahun ke tahun,” kata Jazuli.

Anggota DPR Dapil Banten ini melihat diantara solusi banjir Lebak adalah segera dituntaskannya pembangunan Waduk Karian. Pembangunan waduk ini merupakan Program Pusat tapi masih terkendala pembebasan lahan.

“Saya menyimak pemaparan pema dn relawan setempat, ada program pembangunan Waduk Karian sebagai solusi jangka panjang banjir di Lebak. Tapi sayangnya terkendala pembebasan lahan yang belum dibayar tuntas. Dari total 2226,44 ha lahan yang belum beres proses pembebasan lahannya 1007,77. Ini harus segera dituntaskan sebagai bagian dari upaya pencegahan banjir yang sangat urgen di Lebak,” ungkap Jazuli.

Menurut Jazuli banjir Lebak butuh penanganan serius dari pemerintah mengingat dampak terparah terjadi di sini dibandingkan wilayah lain yang terkena banjir. Banyak tempt-



tempat terisolir yang aksesnya belum atau tidak terjangkau. Dalam catatan Posko PKS masyarakat terdampak sebanyak 13.854 orang dengan 6.287 orang mengungsi. Korban jiwa meninggal 10 orang, 4 orang masih hilang, rumah rusak berat 1.310 dan ratusan lainnya rusak sedang dan ringan.

PKS sendiri, kata Jazuli, telah mendirikan tiga Posko di Lebak yaitu di Somang (Sajira),

Marak (Curugbitung), dan Muhara (Lebakgedong) dan telah menyalurkan bantuan berupa ratusan karung dan karton makanan, air bersih, pakaian layak, pakaian layak, obat-obatan, dll.

Bantuan melalui posko PKS dapat dikirimkan melalui Rekening BSM Nomor 7020685314 atas nama Lili (Konfirmasi wa ke 085210455210/Lili Sekum).

Undang Syahrul Aidi, Bupati Pelalawan Ekspos Potensi Daerah

Salah satu dalam pengembangan tekno park adalah dengan mempersiapkan dan memberdayakan petani swadaya memasuki pasar tersertifikasi dan memiliki pabrik sendiri dengan produk industrial palm oil yang akan mensuplai kebutuhan bahan baku co-processing kilang minyak Pertamina di Dumai menghasilkan biofuel,

HM HARRIS

Bupati Pelalawan

Pangkalan Kerinci (09/01) — Anggota Komisi V DPR RI, Syahrul Aidi Mazaat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau yang langsung diterima oleh Bupati Pelalawan, HM Harris.

Kunjungan Syahrul Aidi ini merupakan tindak lanjut undangan lisan dari Bupati Pelalawan HM Harris kepada beliau saat agenda silaturahmi forum anggota DPR RI Dapil Riau bersama Gubernur Riau dan perangkatnya beserta seluruh kepala daerah se-Riau

yang dilaksanakan pada Senin (6/1/2020) di kediaman Gubri.

Dalam kunjungannya Anggota DPR dari Dapil II Provinsi Riau meninjau langsung pembangunan kawasan tekno park di Kecamatan Langgam bertempat di Aula Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan (ST2P), Rabu (8/1/2020).

Dalam pertemuan ini ada beberapa point masukan yang disampaikan Bupati Pelalawan terutama pengembangan kawasan strategis meliputi kawasan tekno park, wisata Bono, pelabuhan Sokoi dan kawasan sentra pertanian padi Kuala Kampar.

"Salah satu dalam pengembangan tekno park adalah dengan mempersiapkan dan memberdayakan petani swadaya memasuki pasar tersertifikasi dan memiliki pabrik sendiri dengan produk industrial palm oil yang akan mensuplai kebutuhan bahan baku co-processing kilang minyak Pertamina di Dumai menghasilkan biofuel," kata HM Harris saat rapat silaturahmi Syahrul Aidi beserta seluruh perangkat daerah.

Kemudian, lanjut Bupati Harris, dibangun stand alone untuk menghasilkan green gasoline (bensin) berkapasitas 8 ton/jam sedangkan untuk pabriknya akan di bangun oleh PT Pindad (Persero) dan PT WBI dengan system BOT.

"Untuk permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan ini adalah infrastruktur jalan dan jembatan serta perhubungan. Untuk itu kita berharap bantuan dari pak Syahrul Aidi" ujarnya lagi.

Syahrul Aidi Mazaat dalam sambutannya memberikan apresiasi atas pemikiran dan



inovasi Pemkab Pelalawan di bawah kepemimpinan HM Harris untuk maju dan bersaing secara global. Karena dia saat ini diamanahkan oleh partai PKS di Komisi V dengan mitra kerja Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pemerintah Desa, BMKG dan Basarnas.

"Kita akan prioritaskan anggaran yang menjadi kebutuhan Pelalawan, tentunya infrastruktur, pariwisata, perhubungan dan

pemberdayaan masyarakat desa akan kita perjuangkan" ucap Syahrul.

Pelalawan pun bagi Syahrul Aidi bukanlah daerah yang asing. Karena dulunya Pelalawan masih dalam Kabupaten Kampar, dan memiliki adat istiadat yang lekat dengan tanah kelahirannya tersebut.

Dia pun menyebut per elehan suara dia di Pelalawan merupakan tertinggi kedua setelah Kabupaten Kampar.



KOMISI IX / DAERAH PEMILIHAN

Kunjungi KBRI Malaysia

Anggota Komisi IX DPR RI Dr. Hj. Kurniasih Mufidayanti, M.Si melakukan kunjungan di masa Reses ke KBRI di Malaysia, pada Senin (6/1/2020). Dalam kunjungan tersebut, Mufida diterima oleh Wakil Kepala Perwakilan KBRI di Malaysia, Khrisna K.U Hannan dan Atase Tenaga Kerja, Budi H Laksana.

Pada agenda kunjungan tersebut Mufida yang juga dari dapil luar negeri meminta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia untuk menghilangkan praktik percaloan dalam melayani WNI, terutama Pekerja Migran Indonesia (PMI). KBRI juga diminta meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap PMI di Malaysia.

“Saya mendukung berbagai upaya yang telah dilakukan oleh KBRI untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap PMI di Malaysia. Untuk itu juga saya minta KBRI berupaya menghilangkan percaloan dalam pelayanan PMI di KBRI baik calo pengurusan perpanjangan VISA maupun calo dalam hal lainnya,” tegas PKS ini.



DAERAH PEMILIHAN

Kunjungi Korban Banjir dan Longsor

Kab. Bogor (09/01) — Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat V Habib Fahmi Alaydroes membersamai Presiden PKS Sohibus Iman dalam kunjungannya meninjau lokasi dampak banjir dan longsor di Kabupaten Bogor, Kamis (9/01).

Habib Fahmi juga secara langsung memberikan bantuan kepada para korban dampak banjir dan longsor. Ia juga turut berpesan agar para korban dapat bersabar dan bersyukur.

Foto: M Hilal & Donny/PKS Foto



DAERAH PEMILIHAN

Bantuan untuk Warga Korban Banjir

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI III Adang Daradjatun menyerahkan bantuan untuk warga terdampak banjir di RW 01, Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres, pada Selasa, 7 Januari 2019 di jalan Semanan, RT 10 Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres

Bantuan diserahkan melalui Sekertaris RW 01, Ketua RT 10 dan Ketua DPC PKS Kalideres untuk didistribusikan ke masyarakat sesuai kebutuhan.



BANJIR DAN LONGSOR LEBAK

Bantu Korban Banjir Desa Banjarsari

Lebak (8/1) — Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini didampingi Ketua DPD PKS Lebak bersama jajaran pengurus dan tim Posko Bantuan PKS Lebak dan anggota Farksi PKS DPRD kab. Lebak secara khusus mengunjungi korban banjir yang berdekatan dengan Jembatan Cinyiru Desa Banjarsari Lebak Banten

Dalam kesempatan ini Jazuli menyerahkan bantuan yang didonasikan dari gaji DPR bulan Januari. Pekan sebelumnya Jazuli Juwaini juga telah mengirimkan bantuan kepada masyarakat Kabupaten Serang Banten yang juga terkena musibah banjir.



BANJIR DAN LONGSOR LEBAK

Bantu Korban Banjir Desa Sukajaya Sajira

Lebak (8/1) — Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini didampingi Ketua DPD PKS Lebak bersama jajaran pengurus dan tim Posko Bantuan PKS Lebak dan anggota Farksi PKS DPRD kab. Lebak secara khusus Meninjau lokasi dan memberikan bantuan bagi korban banjir akibat luapan sungai Ciberang di Desa Sukajaya Kecamatan Sajira Kab. Lebak Banten

Dalam kesempatan ini Jazuli menyerahkan bantuan yang didonasikan dari gaji DPR bulan Januari. Pekan sebelumnya Jazuli Juwaini juga telah mengirimkan bantuan kepada masyarakat Kabupaten Serang Banten yang juga terkena



BANJIR DAN LONGSOR LEBAK

Bertemu Rombongan PA 212

Lebak (8/1) — Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini didampingi Ketua DPD PKS Lebak bersama jajaran pengurus dan tim Posko Bantuan PKS Lebak dan anggota Farksi PKS DPRD kab. Lebak secara khusus mengunjungi korban banjir Lebak, pada 8 Januari 2020.

Dalam kesempatan ini Jazuli bertemu langsung dengan rombongan PA 212 di dekat lokasi bencana Jembatan Cinyiru Desa Banjarsari, Lebak-Banten



PKS: Pemerintah Gagal Jaga Keseimbangan Primer APBN

Menghadapi kondisi ini, seharusnya pemerintah lebih serius dalam meningkatkan lifting migas dan membangun kilang-kilang domestik baru untuk pengolahan minyak di dalam negeri dalam rangka menyatop impor minyak olahan. Jangan sekedar mengeluh atau berwacana melalui soal mafia migas.

Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Inbang

Jakarta (10/01) — Wakil Ketua Fraksi PKS DPR-RI, Mulyanto minta Pemerintah ke depan memperbaiki keseimbangan primer Anggaran dan defisit transaksi berjalan (DTB) Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan meningkatkan penerimaan dan menyatop impor migas.

Menurut Mulyanto, ada dua catatan negatif yang mencolok dari laporan realisasi APBN 2019, yakni soal keseimbangan primer dan defisit transaksi berjalan. Keduanya sangat terkait dengan sektor migas.

"Keseimbangan primer

adalah penerimaan Negara dikurangi belanja, di luar pembiayaan bunga utang. Idealnya posisi pendapatan lebih besar daripada belanja negara," ungkap Mulyanto.

Dengan demikian lanjut Mulyanto kondisi keuangan dapat dikatakan aman. Sementara jika pendapatan lebih kecil daripada belanja maka untuk membayar bunga hutang diperlukan hutang baru. Ibarat gali lobang, tutup lubang.

"Pada tahun 2018 kesimbangan primer APBN minus Rp 11,5 T, sedangkan tahun 2019, sebagaimana dilaporkan pemerintah

mencapai minus Rp 77,5 T. Anjlok lebih dari 300%", pungkasnya.

Penyebabnya selain karena penerimaan pajak yg rendah, kata Mulyanto, juga adalah karena penerimaan sektor migas yang tidak mencapai target yang disebabkan oleh lifting migas yang terus merosot dari tahun ke tahun.

"Tahun 2017 angka lifting minyak kita sebesar 804 ribu barel per hari. Melorot di tahun 2018 menjadi sebesar 778 ribu barel per hari. Dan kembali anjlok di tahun 2019 menjadi sebesar 741 ribu barel per hari. Akibatnya penerimaan dari sektor migas terus turun", tegas Mulyanto.

Sementara defisit transaksi berjalan, menurut Mulyanto mengalami selisih antara nilai ekspor dan impor, pada tahun 2018 mencapai minus 31.1 milyar USD \$ dan pada tahun 2019 angkanya relatif tidak jauh berubah.

Dari nilai defisit ini kontribusi sektor migas mencapai sekitar 30%. Ini artinya perdagangan kita tekor terus, terutama sektor migas, khususnya impor minyak olahan.

"Terkait impor minyak olahan, defisit transaksi berjalan kita mencapai USD 16 miliar atau setara dengan Rp 230 triliun. Ini bukan angka yang kecil. Dan tentu akan sangat menguras devisa kita," tegas Mulyanto.

Menghadapi kondisi ini, seharusnya pemerintah lebih serius dalam meningkatkan lifting migas dan membangun kilang-kilang domestik baru untuk pengolahan minyak di dalam negeri dalam rangka menyatop impor minyak olahan. Jangan sekedar mengeluh atau berwacana melalui soal mafia migas.

"Yang dibutuhkan adalah langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola migas ini. Kita masih memiliki potensi untuk itu, Karenanya pemerintah

ah harus all out", imbuh Mulyanto yang anggota Komisi VII DPR RI.

Kalau pemerintah berwacana terus, sampai kapan kilang-kilang pengolahan minyak kita beroperasi serta lifting kita kembali meningkat, minimal 1 juta barel per hari.



KPK Klaim Tak Butuh Perpres, HNW: Jangan Sampai Independensi KPK Dipasung

Kalau di bawah eksekutif maka dikhawatirkan independensi KPK tidak maksimal, dan karenanya kinerja KPK untuk melaksanakan tugas-tugas pemberantasan korupsi pun juga tidak maksimal

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI II

Jakarta (09/01) — Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri mengatakan organisasi dan tata kerja KPK cukup diatur melalui Peraturan Komisi (Perkom). Presiden Jokowi tak perlu menerbitkan peraturan presiden (perpres) yang mana sejauh ini drafnya telah beredar.

"Sedangkan terkait beredarnya informasi draf Rancangan Perpres Organisasi dan Tata Kerja (OTK) KPK, maka KPK berpendapat bahwa hal tersebut cukup diatur dalam Peraturan KPK," ujar Ali Fikri kepada wartawan di Kantornya, Jakarta, Senin (6/1).

Ali menjelaskan sebenarnya mengenai hal tersebut sudah jelas diatur dalam Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (8) Undang-

undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Beleid tersebut tidak mengalami perubahan meski UU Nomor 30 Tahun 2002 direvisi menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019.

Pasal 25 ayat (2) menyebutkan ketentuan mengenai prosedur tata kerja KPK diatur lebih lanjut dengan keputusan KPK. Sementara Pasal 26 ayat (8) menyebutkan, ketentuan mengenai tugas Bidang-bidang dan masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur lebih lanjut dengan keputusan KPK.

"Praktik yang berlaku di Kementerian pun OTK diatur dengan peraturan setingkat Peraturan Menteri," ucap Ali membandingkan.

Dalam draf rancangan

Peraturan Presiden (Perpres) tentang OTK KPK, terdapat sejumlah poin-poin yang mendapat sorotan. Seperti terdapat dua organ pelaksana baru yang dibentuk yaitu Deputy Bidang Pemantauan dan Supervisi, serta Inspektorat Jenderal.

Pada bagian keenam, Pasal 20 menjelaskan bahwa Deputy Bidang Pemantauan dan Supervisi mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan dan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Mengenai Inspektorat Jenderal diatur dalam Bagian Kesembilan, Pasal 31 sampai Pasal 34. Inspektorat Jenderal dikatakan sebagai unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan KPK. Posisi ini dipimpin oleh Inspektur Utama.

Inspektur Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawas internal di lingkungan KPK.

Selain itu, pada Bab 1 Pasal 1 Ayat (1) draf Perpres OTK diatur bahwa Pimpinan KPK merupakan pejabat setingkat menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden sebagai

kepala negara.

Rencana Presiden Jokowi menerbitkan perpres tersebut menuai kritik dari sejumlah pihak. Baik dari partai politik maupun aktivis antikorupsi.

Merujuk dari draf yang beredar, PKS menilai Jokowi bertekad mengerdikan KPK lewat perpres tersebut. Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid merasa independensi KPK dipasung.

"Kalau di bawah eksekutif

maka dikhawatirkan independensi KPK tidak maksimal, dan karenanya kinerja KPK untuk melaksanakan tugas-tugas pemberantasan korupsi pun juga tidak maksimal," kata Hidayat di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/12).

"Itu akan membenarkan pengesanan bahwa KPK sekarang dibonsai untuk menjadi di bawah kekuasaan eksekutif," sambungnya.



PROFIL

H. Rofik Hananto, S.E.



Membangun Peradaban
dimulai dari
KELUARGA

Hari Sabtu ini kita akan berkenalan dengan salah satu Anggota #KeluargaPKS FPKS yang muda dan energik, H. Rofik Hananto, S.E. atau biasa dikenal Mas Rofik. Lahir 9 Desember 1971, di Purbalingga, Jawa Tengah atau kini menginjak usia 48 tahun.

Rofik adalah pengusaha dan politisi, sosok pejuang, pekerja keras namun *humble* sejak dari dulu. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2019 - 2024 mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah VII meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen.

Ditempatkan oleh Fraksi di Komisi VII dan Badan Anggaran DPR RI. Jaringan pendukungnya disebut SEMAR (sedulur Mas Rofik), mereka emak- emak, Relawan, Kordes Korcam dan semuanya. Guyub tamplek plek.

Suami dari Hj. Fidhoh Threeyati S.Pd.I ini telah dikaruniai 6 buah hati, Zahidah Zulfa Hanifah, Fahmi Muhammad Hanif, Yahya Raihan Hanif, Nabila Tsabita Hanifa, Hanina Tsurayya Hanifa, Ameera Rasyida Hanifa. Sebuah karunia Allah yang luar biasa. Saat ini keluarga bertambah lagi dengan dua menantu laki-laki dan perempuan.

Rofik lahir dari keluarga sederhana dimana kedua orangtuanya berprofesi sebagai guru. Putra ke-2 dari H. Ilyas Muhammad dan Hj. Sugati ini tetap sederhana dan asyik, meski kesuksesan karier melekat pada dirinya. Langit dan mimpi boleh tinggi, namun harus tetap berpijak di bumi.

Bagi Rofik rumah bukan hanya tempat untuk keluarga, namun bagai "oase" bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai macam pihak. Beliau "sengaja" set up rumah agar *compatible* untuk berbagai macam kegiatan seperti pelatihan, seminar, pertemuan, sharing bisnis dan silaturahmi.

Pesan Mas Rofik untuk keluarga Indonesia "Jika kita menginginkan masyarakat yang beradab, selalu mempunyai energi yang positif, maka mulailah dari keluarga kita sendiri. Karena keluarga terbentuk dari individu individu, maka mulailah dari diri kita sendiri, untuk bisa merubah masyarakat kepada apa yang kita harapkan"



”

Jika kita menginginkan masyarakat yang beradab, selalu mempunyai energi yang positif, maka mulailah dari keluarga kita sendiri.

Untuk mengetahui semua kegiatan parlemen H. Rofik Hananto, S.E dapat mengikuti social media:

Twitter : @rofikhananto | Instagram : @rofikhananto
Website : rofikhananto.com | FP Facebook : Rofik Hananto
<http://fb.com/rofikhananto>





Ketahui segala informasi
terkini ikhtiar politik
PKS di Parlemen

Kunjungi

**KANAL RESMI
FRAKSI PKS
DPR RI**

fraksi.pks.id



Website
fraksi.pks.id



Instagram
[fraksipksdprri](https://www.instagram.com/fraksipksdprri)



Twitter
[@fraksipksdprri](https://twitter.com/fraksipksdprri)



Facebook
Fraksi PKS DPR RI



Youtube
PKSTV DPR RI